

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LIMU POLITIK**

**EVALUASI FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA TERANTANG
MANUK JAYA DALAM PENINGKATAN EKONOMI DI DESA
TERANTANG MANUK KECAMATAN PANGKALAN KURAS
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



ANI

NPM : 137110067

PROGRAM STUDI

ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nama : Ani
 NPM : 137110067
 Program Studi : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

PEKANBARU

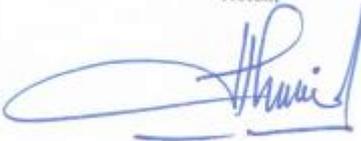
Pekanbaru, 13 April 2019

Pembimbing I, Pembimbing II,

Arief Rifai Harahap, S.Sos., M.Si Eka Komalasari, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Admnitrasi Publik
Ketua,



Hendry Andry, S.Sos, M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : **Fitri**
 NPM : 137110067
 Program Studi : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 15 April 2019

Ketua,

Sekretaris,


Nurmasari S.Sos., M.Si.

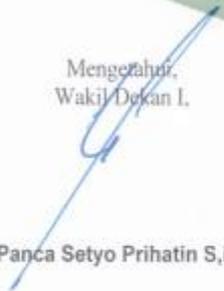

Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.

Anggota,


Arief Rifal Harahap, S.Sos., M.Si

Anggota,

Mengotahur,
Wakil Dekan I,


Dr.H.Panca Setyo Prihatin S,ip.,M.Si


Andri Kurniawan, S.Sos., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 328 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 02 April 2019 maka dihadapan Tim Pengujian pada hari ini, Kamis Tanggal, 04 April 2019 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ani
 NPM : 137110067
 Program Studi : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.

Nilai Ujian : Angka : " 75 " Huruf : B
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Arief Rifai Harahap, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Eka Komalasari, S.Sos., M.Si.	Anggota	4. 
5.	Andri Kurniawan, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 04 April 2019

An. Dekan,


 Dr. H. Parca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
 Wakil Dekan / Bid Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 328/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **A n i**
 N P M : 137110067
 Program Studi : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
 Judul Skripsi : Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

1. Nurmasari, S.Sos., M.Si sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Emma Fitri Lubis, S.Sos., M.Si sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Arief Rifai Harahap, S.Sos., M.Si sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Eka Komalasari, S.Sos., M.Si sebagai Anggota merangkap Penguji
 5. Andri Kurniawan, S.Sos., M.Si sebagai Anggota merangkap Penguji
 6. Eko Handrian, S.Sos., M.Si sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
 Pada Tanggal : 02 April 2019
 An. Dekan,

 DR. H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip., M.Si
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip ————tik penguji

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anj
 NPM : 137110067
 Program Studi : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis. Oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 13 April 2019
 An. Tim Penguji
 Sekretaris,


 Nurmasari S.Sos., M.Si.


 Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui
 Wakil Dekan I


 Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si.

Turut Menyetujui
 Program Studi Administrasi Publik
 Ketua,


 Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu

ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang

tiada terhingga

Semoga Tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta

tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga Allah membahaskan amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Sholawat kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”.

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia. M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang menjadi motifator untuk bisa menjadi orang besar, pintar seperti beliau dan telah memberikan arahan dengan sabar, dan meluangkan tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos.M.Si. selaku ketua program studi Ilmu Administrasi Politik yang telah memberikan saran beserta kritik dari

awal permulaan pengajuan judul Skripsi sampai pada penulisan Skripsi yang layak untuk ujian dalam ujian komprehensif.

4. Bapak Arief Rifai, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan memberikan pengetahuan bimbingan dan arahan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga Skripsi yang penulis buat layak untuk ujian.
5. Ibu Eka Komalasari, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan memberikan pengetahuan bimbingan dan arahan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga Skripsi yang penulis kerjakan dapat diselesaikan.
6. Kepada Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis di saat sedang menjalankan aktivitas belajar yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Skripsi ini
7. Kepada Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam proses Administrasi sehingga dapat menjalani ujian komprehensif penulis.
8. Ucapan terima kasih penulis kepada semua sahabat terutama susila hartini, kiki novita sari, bang darmen, hususnya keluarga Administrasi Publik (AP.B) angkatan 2013 yang telah banyak memberikan bantuan dorongan serta motivasi sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis bermohon kepada yang Maha Esa Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibatasi dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin yarabbal'amin. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Amiin ya Rabbal'alamin.

Pekanbaru, 30 Januari 2019

Penulis

Ani



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRAC.....	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Manfaat Penelitian.....	14
 BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Administrasi.....	16
2. Konsep Organisasi.....	19
3. Konsep Manajemen.....	21
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	23
5. Konsep Evaluasi.....	26
5.1 Jenis-Jenis Evaluasi.....	29
5.2 Proses Evaluasi.....	29
5.3 Fungsi Evaluasi	29
6. Konsep Badan Usaha Milik Desa	31
B. Kerangka Pikir	33
C. Hipotesis.....	34
D. Konsep Operasional	35
E. Operasional Variabel.....	38
F. Teknik Pengukuran	39
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel	44
D. Teknik Penarikan Sampel	46

E. Jenis dan Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisis Data	48
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	49

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kabupate Pelalawan.....	50
1. Keadaan Geografis Kabupaten Pelalawan.....	51
2. Batas Administrasi Daerah Kabupaten Pelalawan	52
3. Jumlah dan Penyebaran Penduduk Kabupaten Pelalawan	53
4. Keadaan Penduduk Kabupaten Pelalawan	54
5. Keadaan Tingkat Pendidikan Dan Sarana Pendukung	56
B. Profil Desa Terantang Manuk	61
C. Profil BUMDes Terantang Jaya	63

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	64
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia	65
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	67
B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indicator Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	68
1. Memantabkan Kelembagaan Perekonomian Desa.....	69
2. Menciptakan Kesempatan Berusaha	73
3. Mendorong Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan	78
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	82
5. Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat	86
6. Memberikan Kesempatan Usaha.....	89
7. Membuka Lapangan Pekerjaan	92
C. Rekapitulasi Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	97
D. Faktor-Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	100

BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	109



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Nama-Nama Kepengurusan BUMDes Desa Terantang Manuk	7
I.2 : Data Laporan Perkembangan Pinjaman Modal Kerja Unit Simpan Pinjam BUMDes Terantang Jaya 3 Tahun Terakhir	9
II.1 : Konsep Operasional Variabel Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	35
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	43
III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	47
IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras	53
IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia Desa Terantang Manuk	54
V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Nasabah BUMDes	65
V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Nasabah BUMDes	66
V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan Nasabah BUMDes	67
V.4 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Nasabah BUMDes Pada Indikator Memantapkan Kelembagaan Perekonomian Desa	70
V.5 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Nasabah BUMDes Pada Indikator Menciptakan Kesempatan Berusaha	74
V.6 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Nasabah BUMDes Pada Indikator Mendorong Peran Pemerintahan Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan	78

V.7	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Nasabah BUMDes Pada Indikator Meningkatkan Asli Pendapatan Daerah	82
V.8	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Nasabah BUMDes Pada Indikator Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Desa	85
V.9	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Nasabah BUMDes Pada Indikator Memberikan Kesmpatan Usaha	88
V.10	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Nasabah BUMDes Pada Indikator Membuka Lapangan Kerja	91
V.11	: Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Nasabah BUMDes terkait dengan judul Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	96

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.I	: Kerangka Pikir Pelaksanaan Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	38
IV.1	: Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Kuisioner Untuk Nasabah BUMDes dengan judul Penelitian tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	106
2	: Daftar Wawancara Penelitian Tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	113
3	: Rekap Telly Penelitian Tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	115
4	: Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa yang berjudul tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	120
5	: Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Terkait Penelitian Yang Berjudul Tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	122
6	: Dokumentasi Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan terkait Penelitian Tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	123
7	: Surat Keterangan Balasan dari Kantor Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya terkait Penelitian Tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	124

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ani

NPM : 137110067

Program Studi : Administrasi Publik

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah,
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 April 2019
Pelaku Pernyataan,



Ani

**EVALUASI FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA TERANTANG
MANUK JAYA DALAM PENINGKATAN EKONOMI DI DESA
TERANTANG MANUK KECAMATAN PANGKALAN KURAS
KABUPATEN PELALAWAN**

ABSTRAK

Oleh
ANI

Kata Kunci : Evaluasi, Fungsi Badan Usaha Milik Desa, Peningkatan Ekonomi Di
Desa

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Indikator dari penelitian ini adalah Memantapkan Kelembagaan Perekonomian Desa, Menciptakan Kesempatan Berusaha, Mendorong Peran Pemerintah Desa Dalam Menaggulangi Kemiskinan, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Desa, Memberikan Kesempatan Usaha, Membuka Lapangan Kerja. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ini adalah Survey Deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Adapun populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Pengawas Kecamatan BUMDes, Direktur BUMDes, Staff Administrasi serta Nasabah Peminjam Dana BUMDes Terantang Manuk Jaya. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam menetapkan individu sampel adalah Teknik Sensus untuk populasi pegawai BUMDes Terantang Manuk Jaya dan teknik Purposive Sampling untuk Nasabah BUMDes Terantang Manuk Jaya, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berada pada interval penilaian “Cukup Baik”.

**EVALUATION OF FUNCTION OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES IN
MANUK JAYA IN ECONOMIC IMPROVEMENT IN VILLAGE VILLAGE,
PANGKALAN KURAS DISTRICT, PELALAWAN DISTRICT**

ABSTRACT

By

ANI

Keywords: *Evaluation, Function of Village-Owned Enterprises, Economic Improvement in Villages*

This study aims to analyze the Evaluation of the Function of a Village-Owned Enterprise Terantang Manuk Jaya in Economic Improvement in Terantang Manuk Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency. The indicator of this study is Strengthening the Village Economic Institution, Creating Business Opportunities, Encouraging the Role of Village Governments in Reducing Poverty, Increasing Regional Original Revenue, Encouraging Economic Growth in Rural Communities, Providing Business Opportunities, Opening Jobs. This type of research located in Terantang Manuk Village, Pangkalan Kuras Subdistrict, Pelalawan Regency is a Descriptive Survey, which prioritizes questionnaire lists as a means of collecting data and data collected with this tool and then becomes the main raw material for analyzing empirical conditions of objectivity in research locations. examined. The population used in this study is the Village Head, BPD Chairperson, BUMDes District Supervisor, Director of BUMDes, Administrative Staff and Terantang BUMDes Fund Borrower Manuk Jaya Customers. The sampling technique used in determining sample individuals is the Census Technique for the employee population of Terantang Manuk Jaya BUMDes and Purposive Sampling techniques for Terantang Manuk Jaya BUMDes customers, the types and data collection techniques used in this study consist of, primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is by using a frequency table tool. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the Evaluation of the Function of the Village-Owned Enterprise Terantang Manuk Jaya in Economic Improvement in Terantang Manuk Village, Pangkalan Kuras Subdistrict, Pelalawan Regency was at the "Fairly Good" assessment interval.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu dan komitmen yang sudah dibuat bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Syafri 2012;12). Hal ini sebenarnya sesuai dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerapkan otonomi daerah sehingga hubungan ada hubungan kerjasama antara pusat dan daerah.

Keberadaan pemerintah daerah mendapat landasan yuridis dengan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1) disebutkan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah kabupaten dan kota mempunyai daerah pemerintahan sendiri”. pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota pada dasarnya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu.

Kehadiran Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah direvisi menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah menjabarkan dan melaksanakan tujuan maksud dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, selain mengatur tentang kedudukan pemerintah daerah, dalam pasal 18B ayat 2 juga disebutkan “negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”. Dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa Negara melakukan penyesuaian

terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat, yang didalamnya mencakup desa, negeri, mukim, kampong, marga, negeri, parangiu, prakam, lembaga, dan seterusnya. Dalam undang-undang No. 23 tahun 2014 kedudukan desa dibawah kabupaten/kota berarti desa menjadi sub ordinasi kabupaten/kota dalam hubungan wilayah administrasi. Dengan demikian, desa tidak lagi berada dibawah melakinkan berada diwilayah administrasi. Dengan demikian, desa tidak lagi berada di bawah kecamatan melainkan berada di bawah kabupaten/kota.

Sesuai dengan konsep otonomi daerah menurut Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 213 ayat (1) di sebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adapun hak dan kewajiban desa menurut Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 ayat 1 dan 2 adalah:

Pasal 67 ayat (1):

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. Mendapatkan Sumber Pendapatan.

Pasal 67 ayat (2):

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan RI.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa
- c. Mengembangkan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 132 dijelaskan:

1. Desa dapat mendirikan BUM Desa
2. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa
3. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa
4. Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Penasihat
 - b. Pelaksana operasional
5. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara ex-office oleh kepala desa.
6. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang di angkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
7. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Dilihat dari Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 132 pada ayat satu dijelaskan bahwasanya desa diberikan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan pada

pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bab II Pasal (3) tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan perekonomian desa,
- b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa,
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ke tiga,
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pаса yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,
- f. Membuka lapangan kerja,
- g. Meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli.

Melihat dari Potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang begitu penting maka, daerah-daerah merasa bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu dibentuk di daerahnya seperti halnya Kabupaten Pelalawan yang menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerahnya. Hal ini di tandai dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2012

tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Kabupaten Pelalawan serta Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Kabupaten Pelalawan.

Adapun latar belakang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ialah melihat potensi Desa yang dapat dikembangkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan memberikan kesempatan peluang berusaha dalam segala sektor kegiatan perekonomian masyarakat dan dengan dikucurkannya Dana Usaha Desa melalui program pemberdayaan desa sharing manajemen antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan maka memungkinkan bagi desa di Kabupaten Pelalawan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk tindak lanjut dari keberlangsungan Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP). Fungsi BUMDes ini adalah untuk mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat, meningkatkan kreativitas dan peluang ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah, mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa yang terbebas dari pengaruh pelepasan uang/rentenir, meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan suatu kesatuan ekonomi.

Berdasarkan PP no. 43 Tahun 2014, Sumber Dana BUMDes ini adalah sebagai berikut:

1. Modal awal BUM Desa, bersumber dari APB Desa,
2. Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
3. Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Desa, dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
4. Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa dapat bersumber dari:
 - a. Dana segar
 - b. Bantuan Pemerintah
 - c. Bantuan Pemerintah Daerah
 - d. Asset dana yang diserahkan kepada APB Desa.

Agar dapat berjalannya fungsi dari BUMDes diperlukannya kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten. Setelah dilakukannya kerjasama antar pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten, maka pihak Kabupaten Pelalawan pun memberikan tanggung jawab kepada desa-desa khususnya Desa Terantang Manuk. Desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang berada di daerah kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Untuk mengetahui berjalan atau tidaknya kegiatan pada program BUMDesa, maka ada pihak-pihak yang harus mengawasi jalannya Program BUMDesa tersebut. Adapun pihak-pihak yang mengawasi BUM Desa Tentang Manuk adalah :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Tokoh Perempuan
3. Ketua LKMD

Desa Terantang Manuk juga mengelola BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa tersebut. Desa Terantang Manuk terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau yang disebut dengan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) Terantang Manuk Jaya ditetapkan pada tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terantang Manuk Jaya Desa Terantang Manuk. Adapun maksud dan tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terantang Manuk menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terantang Manuk Jaya ialah:

- a. Maksud
Segala usaha desa, guna mendorong/penampungan seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diselenggarakan untuk dikelola oleh masyarakat.
- b. Tujuan
 1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat
 2. Meningkatkan kreativitas dan peluang ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah
 3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa yang terbebas dari pengaruh pelepasan uang/rentenir.
 4. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan member pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
 5. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran seras membantu pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
 6. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan suatu kesatuan ekonomi masyarakat desa.

Sesuai dengan pasal 1 pada Anggaran dan merupakan suatu kesatuan terantang Manuk Jaya Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangakalan Kuras bidang usaha tersebut meliputi:

- a. Simpan Pinjam
- b. Penyediaan Saran Produksi Pertanian (Sprodi)
- c. Pengkreditan Barang
- d. Pengelolaan Pasar

Bentuk kegiatan yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras saat ini adalah Simpan Pinjam. Kegiatan simpan Pinjam yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya ini sebenarnya telah berlangsung cukup lama sebelum di tetapkannya Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Desa Terantang Kecamatan Pangkalan Kuras pada tahun 2015. Kegiatan Simpan Pinjam yang saat ini berlangsung telah dijalankan oleh Usaha Ekonomi Desa (UED). Adapun dalam kepengurusan pada BUMDes di desa ini tentunya ada aparatur yang menjalankan kegiatan simpan-pinjam ini. Berikut Nama serta jabatan pengurus BUMDes di Desa Terantang Manuk Jaya Kabupaten Pelalawan:

Tabel I.1: Nama-Nama Kepengurusan BUMDes Desa Terantang Manuk

No.	Nama	Jabatan
1.	Janri, ST	Direktur
2.	Syahrul	KA. Unit SP
3.	Nursiti Fadilah	Staf Analisa Kredit
4.	Desmawati, M.Pd.I	Staf Keuangan
5.	Desmawati	Staf Administrasi

Sumber: *Profil BUMDes Terantang Jaya Desa Terantang Manuk* , 2018

Dari tabel I.1 di atas merupakan nama-nama yang menjadi kepengurusan BUMDes Terantang Manuk Jaya di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Pengurus BUMDes ini di tetapkan di tetapkan atau

disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan berlaku selama 3 (tiga) tahun. Selain kepengurusan tetap, juga diperlukannya tenaga pendamping yang memberikan bantuan teknis, bimbingan dan pengembangan kelembagaan seluruh lokasi program termasuk Desa Terantag Manuk yang diseleksi dan ditugaskan oleh BPPM Provinsi Riau dengan pendidikan minimal S-1 dan pengalaman minimal 4 (empat) tahun dengan tujuan:

1. Memfasilitasi setiap tahapan program secara benar
2. Efisien dan efektivitas pelaksanaan program
3. Optimalisasi kegiatan program
4. Transfer pengetahuan dan teknologi
5. Membantu perumusann dan penyempurnaan Pedum dan Juknis Program.

Tenaga pendamping memiliki tugas untuk mengarahkan setiap jenis-jenis usaha yang di tentukan dalam Peraturan Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Nomor: 08/PerDes. TRm/kpts/02/2015

BAB III Pasal 5 tentang Bidang Usaha, yaitu:

1. Jasa Keuangan meliputi Simpan-Pinjam
2. Jasa lain meliputi: listrik desa, pasar desa, telekomunikasi desa, transportasi, pengelolaan sampah, penggilingan padi, air bersih, penyewaan tenda, penyewaab sarana produksi pertanian, rental computer, percetakan dan alat tulis kantor.
3. Perdagangan meliputi: pengelolaan pasar desa, penyediaan sarana produksi pertanian, perdagangan hasil pertanian.
4. Industri kecil meliputi: pakan ternak, pakan ikan dan kerajinan rumah tangga;
5. Kegiatan pertambangan rakyat meliputi: galian C
6. Kegiatan Kehutanan meliputi: Budidaya lebah madu, budidaya rotan dan kayu gaharu.
7. Kagiatan perkebunan meliputi: kebun karet, kelapa sawit, cokeltas, gaharu dan pembibitannya.

8. Kegiatan budidaya ikan air tawar meliputi: keramba, kolam, dan pembibitan ikan.
9. Kegiatan peternakan meliputi: penggemukan sapi, unggas, kambing dan kerbau.

Dari beberapa kegiatan di atas yang ditentukan dalam Peraturan Desa pada realitanya berdasarkan pra observasi penulis bahwa jenis usaha yang baru terlaksana dalam 3 (tiga) tahun ini adalah kegiatan simpan-pinjam dari 8 jenis usaha. Hal ini merupakan bentuk jenis usaha awal yang di lakukan oleh pihak BUMDes guna untuk mengenalkan kegiatan tersebut kepada masyarakat.

Untuk menjalankan program-program yang telah di rancang guna mewujudkan misi dan visi dari BUMDes Terantang Jaya Desa Terantang Manuk Kecamatan PKL.Kuras Kabupaten Pelalawan, pengurus dari BUMDes telah membentuk Tugas-Tugas dari BUMDes itu sendiri, dan adapun Tugas BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.
2. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
3. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
4. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
5. Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum masyarakat desa minimal satu kali dalam setahun.

Sementara itu azas mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban dari BUMDes Terantang Jaya dapat di lihat pada penyajian data di bawah ini:

1. Azas pengelolaan BUMDes:
 - a. Pengelolaan kegiatan BUMDesa dilakukan secara terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan;

- b. Warga masyarakat terlibat secara aktif;
 - c. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan.
2. Mekanisme pengelolaan BUMDes dilaksanakan dengan berpedoman pada azas pengelolaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan lebih lanjut di atur dalam AD/ART BUMDes;
3. Pertanggungjawaban;
 - a. Direktur BUMDes melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada kepala Desa;
 - b. Sistem Pelaporan pertanggungjawaban, dibuat berdasarkan jenis usaha kegiatan;
 - c. Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah Desa yang di hadiri oleh masyarakat.

Berikut data tentang jenis usaha dan jumlah masyarakat yang melakukan simpan-pinjam:

Tabel 1.2 Data Laporan Perkembangan Pinjaman Modal Kerja Unit Simpan Pinjam BUMDes Terantang Jaya 3 Tahun Terakhir.

No	Jenis Usaha	Tahun			Total
		2015	2016	2017	
1	Perdagangan	-	-	-	-
2	Pertanian	-	-	-	-
3	Perkebunan	48 KK	45 KK	34 KK	127 K
4	Perikanan	-	-	-	-
5	Peternakan	-	-	-	-
6	Industri kecil	-	-	-	-
7	Jasa	-	-	-	-
Jumlah		48 KK	45 KK	34KK	127 K

Sumber : *BUM Desa Tenrangtang Manuk Jaya Tahun 2015*

Dari data I.2 di atas dapat dilihat bahwa masyarakat yang meminjam tentunya yang sudah memiliki usaha bukan masyarakat yang ingin memulai usaha untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Jelas pelaksanaan ini kurang efektif karena pinjaman belum bisa di lakukan dalam berbagai lapisan masyarakat.

Data di atas tertera yang meminjam uang adalah orang yang memiliki kebun, dan peternakan, dan untuk masarakat yang belum memiliki usaha karena tidak memiliki anggungan, hal ini harus diperhatikan kembali bagaimana fungsi dari keberadaan BUMDes ini. Selain itu, tertera pada data di atas bahwa jumlah Kepala Keluarga yang melakukan peminjaman setiap tahunnya mengalami penurunan, yaitu dari tahun 2015 ada 48 KK, pada tahun 2016 ada 45 KK, dan pada tahun 2017 ada 34 KK, hal ini dapat di ketahui bahwa masyarakat sudah berkurang melakukan peminjaman ke BUMDes. Adapun persyaratan dalam melakukan peminjaman di Badan Usaha Miliki Desa Terantang Manuk Jaya Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras adalah:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 Lembar
2. Pas Foto (2x3) 2 lembar
3. Fotocopy KK 2 Lembar
4. Fotocopy Anggungan (seperti surat tanah)
5. Membuat proposal permohonan peminjaman

Jika salah satu persyaratannya adalah harus memiliki anggungan (surat tanah, atau jaminan lainnya), maka tidak semua masyarakat yang memiliki anggungan. Dengan arti kata bahwa tidak semua masyarakat bisa meminjam uang di BUM Desa. Hal ini tentunya tujuan dan fungsi dari BUM Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khusus Desa Terantang Manuk Jaya belum tercapai.

Selain itu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program-program dari BUM Desa yang seharusnya terlaksana dan merupakan hak dari masyarakat, dan yang masyarakat tahu tentang BUM Desa adalah untuk meminjam uang. Hal ini diperkuat dari informasi yang penulis dapatkan dari masyarakat langsung yaitu dengan ibu maysittah:

“Yang saya tahu tentang BUM Desa adalah tempat meminjam uang, kalau program-program lainnya saya tidak pernah tahu. Dan saya pun ngga bisa minjam karena saya nggak punya anggunan” (Sumber: Ibu Maysittah, pada tanggal 30 September 2018)

Berdasarkan pengamatan awal dari penulis dan data di atas maka penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena masalah yang didasari dari data-data awal yang penulis dapatkan dari berbagai macam sumber yang mana salah satunya adalah surat kabar media online dan data sekunder dari Desa Terantang Manuk Jaya yang memperkuat dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. dan fenomena-fenomena yang penulis temukan adalah :

1. Penulis melihat dari tujuh jenis usaha yang di tentukan dalam Perdes, tetapi hanya terlaksana simpan-pinjam pada bidang perkebunan , hal ini dapat di lihat bahwa kegiatan BUMDes belum di lakukan secara maksimal.
2. Belum adanya upaya serius dari Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, karena tidak semua lapisan masyarakat yang bisa meminjam uang ke BUMDes, hal ini dikarenakan masyarakat harus memiliki anggunan, tentunya tidak semua masyarakat memiliki anggunan.
3. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BUMDes tentang program-program yang dijalankan sehingga masyarakat masih banyak belum tahu tentang program yang dijalankan oleh pihak BUMDes.

(sumber: Ibu Maysittah tanggal 30 September 2018.)

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang serta fenomena di atas, bahwa BUMDes memiliki peran dalam peningkatan ekonomi masyarakat Desa Terantang Manuk Jaya. Dan dari penjelasan di atas maka penulis dapat menarik perumusan masalah sebagai berikut ini: **“Bagaimanakah Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”?**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menganalisis Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
2. Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang Administrasi, khususnya dibidang Administrasi Publik.
 - b. Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

- c. Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi BUMDes Desa Terantang Manuk Jaya Kecamatan Pangkalam Kuras Kabupaten Pelalawan.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang usulan penelitian, penulis mengembangkan beberapa konsep teori yang di perlukan sebagai landasan teori yang dijadikan sebagai titik tolak ukur pada permasalahan.

Adapun pengertian teori adalah serangkaian asumsi konsep, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Oleh karena itu untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, penulis akan menjelaskan kerangka teori penelitian ini.

1. Konsep Administrasi

Menurut Dunsire (dalam Kusdi, 2011 ;7) Administrasi dapat diartikan sebagai cara atau sarana untuk menggerakkan organisasi. Menurut Siagian (2003 ; 2), Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukannya organisasi yaitu sebagai wadah atau tempat dalam melangsungkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Mengacu kepada perspektif jasa pelayanan sebagai produk suatu lembaga, konsep administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu-satu sekelompok orang tertentu. Keterangan itu cenderung di manfaatkannya untuk memenuhi per-

Syarat dalam mencapai kebutuhan atau tujuan lainnya. Administrasi sebagai salah satu cabang studi ilmu sosial, definisinya tidak terbatas hanya sekedar pekerjaan yang berkenaan dengan ketatausahaan dari suatu organisasi. administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Atmosudirdjo (dalam Zulkifli, 2009:9) misalnya terpaksa harus merumuskan ragam pengertian untuk menerangkan lingkup konsep administrasi yaitu :

2. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (*activity*) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung didalamnya.
3. Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan statuta yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (*purpose*) dan tujuan-tujuannya (*goals*), usahanya, sumber pendanaannya (*financial resources*), serta langka-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.
4. Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang mengerjakan secara terarah dan bertujuan) oleh administrator.
5. Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan.
6. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya melalui apa yang disebut administrasi.

Tentang pentingnya kebijakan pembagian kerja berdasarkan masing-masing hirarki organisasi tergambar dalam batasan berikut ini. Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana yang di tentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Adam (dalam Syafri,2012;8) administrasi adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lainnya didalam satu organisasi sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan.

Menurut Silalahi (dalam Zulkifli,2009;10) Terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah definisi konsep administrasi tersebut.

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi,waktu dan tempat dimana dia di jalankan.
2. Bahwa didalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur; adanya dua orang manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya tugas tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas; adanya pertimbangan rasional dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai sesuatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan semenjak manusia mengenal peradapan. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan tergambar dari ungkapan yang dikemukakan oleh herbert A. Simond (Zulkufli 2009;11) yaitu apabila ada dua orang yang bekerja bersama untuk menggulingkan sebuah batu yang tidak dapat di gulingkan hanya oleh seseorang diantara mereka,pada saat itu administrasi telah ada.

Jika dilihat dari jenis pelayanan diatas administrasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu: Administrasi Negara dan Administrasi Niaga. Kedua administrasi tersebut mempunyai perbedaan yaitu administrasi negara lebih berorientasi kepada kegiatan kerja sama yang ada pada ruang lingkup pemerintahan dan juga lebih mementingkan kepentingan masyarakat dan tidak mengambil keuntungan, sedangkan administrasi niaga lebih berorientasi pada kegiatan kerjasama bisnis, yakni lebih mengutamakan keuntungan dari masyarakat yang berkepentingan.

Selanjutnya menurut Hodgkinson (dalam Kusdi, 2011:7) Administrasi adalah aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai dan komponen-komponen manusia dalam organisasi. Pemerintah menjalankan tugas kerjasama untuk mencapai sasaran pembangunan melalui aparatur pemerintahan, jadi dalam hal ini perlu administrasi yang dimaksud atas pemerintah dan masyarakat.

2. Konsep Organisasi

Dalam pelaksanaan administrasi, sebuah organisasi merupakan salah satu tempat yang wajib dimiliki dan berperan penting. Tanpa organisasi tidak akan mungkin sebuah rencana akan tercapai terutama di dalam pemerintahan yang bertujuan untuk tercapainya otonomi daerah. Menurut Ancok (2012:21) organisasi sebagai tempat bagi sejumlah manusia untuk menjalankan aktivitas-aktivitas dalam pencapaian tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan bersama dalam sebuah kelompok.

Menurut Torang (2013; 25) Organisasi adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksanaan tugas yang didisain untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta cara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang /sekelompok orang yang disebut bawahan (Siagian, 2008:6).

Konsep organisasi (*organization*) nampaknya merupakan titik sentral dari maksud dan tujuan diaplikasikannya setiap aspek studi administrasi. Bahwa keberadaan setiap aspek studi administrasi itu dimaksudkan untuk memberikan

dukungan kepada kebijakan managerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Definisi konsep administrasi dalam arti luas ber titik tolak dari pendekatan multi aspek dan dimensi yang melekat dengan aktivitas organisasi itu. Pendekatan demikian melatar belakangi beragam redaksionis definisi organisasi yang telah di tulis. Siagian (dalam Zulkifli 2009;14). Merumuskan definisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang di sebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang di sebut bawahan.

Sebagai suatu proses organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif dari orang orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan, dan di akhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas. Definisi organisasi menurut pendekatan proses antara lain tergambar dalam pendapat Massie (dalam Zulkifli, 2009;14). Yaitu organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok orang yang membagi tugas tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan hubungan kerja dan menyatukan aktivitas aktivitasnya ke arah pencapaian tujuan bersama.

Organisasi adalah kolektivitas khusus manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dunsire (dalam Kusdi, 2011;4).

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan tempat atau wadah pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas bagi pencapaian tujuan (Syafri, 2012;12).

Menurut Dimock (dalam Kahmad, 2012;18) menyatakan organisasi adalah perpaduan dari sitematis dari bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah di tentukan.

Sementara itu menurut barnard (dalam budiyono, 2004;166) organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan organisasi merupakan badan, wadah, tempat dari kumpulan orang-orang yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

3. Konsep Manajemen

Menurut Manullang (2002 ; 3), Bila mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan ketiga manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut Budiyono (dalam Terry, 2004;7) mendefinisikan manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengadilan yang dilakukan untuk menentukan melalui pemanfaatan daya manusia dan sumber daya lainnya.

Manajemen sebagai suatu seni (*Art*) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan, tetapi banyak para pendapat dan para ahli berbeda pendapat tentang manajemen. Ciri-ciri manajemen sebagai ilmu:

1. Kesuksesan dalam mencapai tujuan sangat di pengaruhi dan di dukung oleh sifat-sifat dan bakat.
2. Dalam proses pencapaian tujuan sering kali melibatkan unsur naluri.

3. Dalam pelaksanaan kegiatan, faktor yang cukup yang menentukan keberhasilan.

Menurut Feriyanto dan Shyta (2015;4) Manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai proses kegiatan dalam rangka menerapkan tujuan dan sebagai kemampuan dan keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut pendapat Siagian (2003;5), mengatakan, manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dalam manajemen adanya peranan disetiap tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama. Berpedoman kepada sejumlah literatur ilmu administrasi dan manajemen, juga di temukan sudut pandang yang berbeda dikalangan para praktisi dan akademisi dalam merumuskan batasan atau definisi konsep manajemen.

Definisi konsep manajemen yang menunjukkan secara eksplisit esensialnya penataan terhadap sumber daya organisasi, tergambar pada rumusan yang dikemukakan oleh The Liang Gie (dalam Zulkifli 2009;16) menurutnya manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki 6 fungsi utama: Perencanaan, Pembuatan keputusan, Pengarahan, Pengkoordinasian, Pengontrolan dan Penyempurnaan.

Perencanaan adalah kegiatan yang menentukan hal hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tentukan serta bagaimana cara-cara mengerjakannya.

1. *Pembuatan keputusan* adalah kegiatan yang melakukan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan, keraguan yang timbul dalam kerja sama.
2. *Pengarahan* adalah kegiatan membimbing bawahan dengan jalan memberikan perintah, memberikan petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan teguran, dan lain usaha semacam itu agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang telah di tetapkan.
3. *Pengkoordinasian* adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap serta mencegah pertentangan, kekacauan, kekembaran, kekosongan tindakan.
4. *Pengontrolan* adalah kegiatan yang mengusahakan pekerjaan serta hasil hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk atau ketentuan ketentuan ditetapkan.
5. *Penyempurnaan* adalah kegiatan memperbaiki segenap segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dapat tercapai secara efisien.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktifitas, secara umum sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu organisasi bisa di kelompokkan atas 2 macam yaitu (1) Sumber Daya Manusia, (2) Sumber Daya Non-Manusia.

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya perusahaan, karyawan, dan masyarakat. (Hasibuan,2012;10)

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia bila di uraikan berasal dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen berarti mengarahkan dan

mendorong Sumber Daya Manusia untuk bekerja sebagai partner dalam mencapai kesuksesan organisasi dimasa sekarang dan di masa yang akan datang.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Manajemen sebagai suatu ilmu dapat pula di lihat sebagai suatu pendekatan (approach) terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh indra manusia. (siswanto,2011:7).

Menurut Malayu (2007 ; 9) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari enam unsur (6 M) yaitu :*man, money,metode,materials,machines dan market*.Unsur man (manusia) ini berkembang menjadi satu Bidang Ilmu Manajemen yang di sebut Manajemen Sumber Daya Manusia.

Menurut Indrastuti dan Amries (2012 : 1) “Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia (tenaga kerja) yang dimiliki individu yang di manage oleh para profesional Sumber Daya Manusia dan manajer sehingga 6M (Man, Money, Machines, Method, Materials, Market) dapat dikelola secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (*goal*) perusahaan.”

Manajemen sumber daya manusia adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan

organisasi. Sedangkan Rivai (dalam Suswanto dan Donni 2011;29) mengatakan bahwa manajemen Sumber Daya Manusia merupakan satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

Menurut Flippo (dalam Handoko 1995;6) Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu: perencanaan, pengarah dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia dapat disoroti dari berbagai perspektif.

Adapun unsur-unsur sumber daya manusia yaitu: kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, karakteristik demografisnya (penduduk). Unsur sumber daya manusia sangat berpengaruh oleh lingkungan sekitar, seperti norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan dan juga peluang yang tersedia. Sumber daya manusia sangat berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Dimana dengan adanya manusia yang berpendidikan dan memiliki kemampuan dalam manajemen maka itu akan sangat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah di buat.

Menurut mangkunegara (2011;2) manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahaan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya administrasi juga dapat di definisikan sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada

pada individu (pegawai). Hubungan manajemen dengan sumber daya manusia merupakan proses usaha pencapaian tujuan melalui kerja sama dengan orang lain. Ini berarti menunjukkan pemanfaatan daya yang bersumber dari orang lain untuk mencapai tujuan. Untuk itu manajemen sumber daya manusia perlu dikelola secara profesional dan baik agar dapat terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan lingkungan serta kemampuan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama suatu organisasi agar dapat berkembang secara produktif dan wajar.

5. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memerhitungkan dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu di tunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau lebih tahu kepada yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penilaian positif dan negative atau juga gabungan dari keduanya.

Menurut Nurcholis (2005:169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat

mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Arikunto dan Cepi dalam Afifudin (2013;251) Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Menurut Subarsono(2005:123) alasan evaluasi kebijakan adalah (1) untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, (2) mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, (3) memenuhi aspek akuntabilitas public, (4) menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan (5) agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaiknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

Menurut Dunn menjelaskan ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi :

1. Evaluasi semu (*pseudoevaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menyanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, dan masyarakat.
2. Evaluasi formal (*formal evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan
3. Evaluasi proses keputusan teoritis (*desion theoretic evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan secara ekspelisis diinginkan oleh berbagai *stakeholders*.

Adapun menurut Sondang P. Siagian (2005 : 174) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai

dan yang menurut kenyataan di capai. Artinya melalui penilaian harus dapat di temukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses, Output dan Outcome (hasil), melalui evaluasi dapat di ketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak (Nurcholis, 2005 : 67)

Evaluasi menurut Ndraha (2003: 201) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

- a. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (prilaku treatment) tolak ukuranya adalah *before*.
- b. Model *das solen-das* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
- c. Model kelompok *control*-kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok *control* (Ndraha,2003:202).

Evaluasi menurut Santoso (2004; 31) adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan berkaitan erat dengan perencanaan yang secara utuh adalah salah satu fungsi dalam siklus manajemen apa saja yang direncanakan.

Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto dan Cepi (2008: 2), bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan

diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Menurut Nurcholis (2005 : 274) Evaluasi kebijakan publik adalah penilaian secara menyeluruh input, proses, *outputs* dan *outcomes* dari kebijakan pemerintah daerah.

5.1 Jenis-jenis Evaluasi.

Jika di lihat dari pentahapannya, secara umum menurut Ernest R. Alexander dalam Aminudin (2007), evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu:

1. *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya.
2. *Actual versus planned performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan perencanaan yang ada (*planned*)
3. *Experintal (controlled) model*, metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
4. *Quasi experimental models*, merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
5. *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

5.2 Proses Evaluasi.

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus di dasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidak jelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, antara lain:

1. Suatu tugas atau tanggung jawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas.
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus di hindari.
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah di cantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu di konsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus didasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

5.3 Fungsi Evaluasi.

Wahad (2002;51) Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat di capai melalui tindakan public. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.

2. Evaluasi member sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat member sumbangan pada perumusan kebijakan.

6. Konsep Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Muryani (dalam Ilham 2008) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan hasil seperti laba atau keuntungan.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 1 Badan usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang di pisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa, yaitu:

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat

2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa yang terbebas dari pengaruh pelepasan uang/rentenir
4. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
5. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
6. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan suatu kesatuan ekonomi masyarakat Desa

Dari fungsi badan usaha milik desa tersebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipandang cukup penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat di desa, maka tentu saja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tuntut agar lebih profesional demi meningkatkan sumber penghasilan masyarakat desa. Dalam hal ini terdapat beberapa alasan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

- a. Alasan ekonomi, yaitu sebagai langkah mengoptimalkan ekonomi didesa upaya dan menggali serta mengembangkan sumber daya desa, memberikan pelayanan masyarakat dan mencari keuntungan,
- b. Alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha melayani kepentingan publik, baik investasi yang sangat besar, resiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalisasi sangat besar dan luas,
- c. Alasan budget, yaitu sebagai upaya pemerintah desa dalam mencari pendapatan diluar pajak, restribusi dan dana pertimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan pemerinah desa.
- d. Alasan politik, yaitu mempertahankan potensi ekonomi yang mempunyai daya dukung politik bagi pemerintah desa, yang mana alasan politisiny abiasnya jarang dikemukakan, lebih lagi secura formal.

Adapun tujuan pembentukan BUMDesa berdasarkan Perda Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 Pasal 3 tentang Tujuan Pembentukan BUMDes:

1. Tujuan umum pembentukan BUMDes adalah mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.
2. Tujuan khusus pembentukan BUMDes adalah:
 - a. Memantapkan kelembagaan perekonomian desa
 - b. Menciptakan kesempatan berusaha
 - c. Mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan
 - d. Meningkatkan pendapatan asli desa
 - e. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa
 - f. Memberikan kesempatan usaha
 - g. Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja

B. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau teori yang di susun dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang disesuaikan dengan konsep penelitian yang sedang di teliti.

Gambar II.1: Kerangka Pikir Bagaimana Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan



Sumber: *Statistik Daerah Tahun 2012*

C. Hipotesis

Pada Penelitian ini penulis dapat menetapkan hipotesis yaitu sebagai berikut: “Diduga Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan belum terlaksana dengan cukup baik”.

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari dari kesalahan pemahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. Administrasi menurut Sondang Siagian (2014:4) administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi Menurut Siagian (dalam Zulkifli,2009;71) adalah sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

4. Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya (Ndraha, 2003;202).
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Muryani (dalam Ilham 2008) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun keretakan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan hasil seperti laba atau keuntungan.
6. Indikator Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berdasarkan Perda Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 pasal 3:
 - a) Memantapkan kelembagaan perekonomian desa
Menetapkan kelembagaan desa memiliki artian dimana setiap desa harus memiliki lembaga yang dapat memberikan pemberdayaan kepada masyarakatnya.
 - b) Menciptakan Kesempatan Berusaha
Penetapan kelembagaan desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat di harapkan dapat membentuk atau memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah kebawah.

- c) Mendorong Peran Pemerintahan Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dan memberikan lapangan pekerjaan atau berusaha kepada masyarakat, diharapkan tentunya dapat mendorong penanggulangan terhadap kemiskinan di tiap-tiap desa yang mendirikan lembaga pemberdayaan.

- d) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan juga jenis usaha lainnya yang dapat di kelola secara mandiri oleh masyarakat tentunya akan berdampak kepada pendapatan pajak atau retribusi yang akan di terima oleh Daerah.

- e) Mendorong pertumbuhan perkonomian masyarakat desa.

Dengan pemberdayaan yang di ciptakan dari lembaga-lembaga yang ada di desa, tentunya akan mendorong perekonomian masyarakat desa apabila di jalankan sesuai dengan aturan dan juga di jalankan dengan tepat sasaran.

- f) Memberikan Kesempatan Usaha.

Pemberdayaan dengan system menciptakan lembaga-lembaga di desa akan memberikan lapangan usaha atau kesempatan kepada masyarakat untuk menciptakan kesempatan usaha, di mana lembaga memiliki andil sebagai penyedia modal pinjaman.

- g) Membuka Lapangan Kerja

Selain lapangan usaha yang berkembang, lapangan pekerjaan juga secara otomatis akan terbuka kepada masyarakat di sekitar yang di ciptakan dari proses pembukaan lapangan usaha seperti yang telah di jelaskan di atas.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya (Ndraha, 2003;202).	Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya.	1. Memantapkan Kelembagaan perekonomian desa	a. Membentuk tim pengawas dan pembimbing yang memiliki pendidikan tinggi b. Memiliki petunjuk teknis yang jelas untuk menjalankan kegiatan BUMDes.	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		2. Menciptakan Kesempatan Berusaha.	a. Melakukan kegiatan BUMDes dalam Simpan-Pinjam secara merata dan adil Tanpa Perbedaan. b. Memberikan Kemudahan Persyaratan kepada masyarakat kurang mampu.	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		3. Mendorong Peran Pemerintahan Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan.	a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan program BUMDes b. Memberikan bimbingan atau pelatihan kepada tim pembimbing.	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik

		4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	<p>a. Pengembangan Program Untuk Meningkatkan Usaha Masyarakat.</p> <p>b. Memberikan Pelatihan Untuk Menciptakan Produk-Produk Asli Daerah yang memiliki Nilai Jual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		5. Mendorong pertumbuhan perkonomian masyarakat desa	<p>a. Merealisasikan Kegiatan BUMDes Secara Transpran.</p> <p>b. Mengutamakan Masyarakat dengan tingkat Perekonomian Rendah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik

Sumber: *Modifikasi Penulis 2019*

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya (Ndraha, 2003;202).	Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya.	6. Memberikan Kesempatan Usaha.	<p>a. Memberikan Pelatihan Terlebih Dahulu Kepada Masyarakat agar dapat mengelola usaha.</p> <p>b. Melakukan pengawasan secara intensif terhadap masyarakat yang sudah diberikan pinjaman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		7. Membuka Lapangan Pekerjaan	<p>a. Memberikan modal secara materil untuk membuka usaha bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.</p> <p>b. Mendorong Masyarakat untuk menciptakan industri yang mampu menyerap tenaga kerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik

Sumber: *Modifikasi Penulis 2018*

F. Teknik Pengukuran

Guna mengetahui Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, maka dilakukan pengukuran secara keseluruhan dengan tiga tingkatan atau variasi penilaian yaitu sebagai berikut: Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Mencapai Persentase 67%-100%
- Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Mencapai Persentase 34%-66%
- Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Mencapai Persentase 0% - 33%.

A. Memantapkan Kelembagaan Perekonomian Desa

- Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Memantapkan Kelembagaan Perekonomian Desa berada pada skala 67%-100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Memantapkan Kelembagaan Perekonomian Desa berada pada skala 34%-66%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Memantapkan Kelembagaan Perekonomian Desa berada pada skala 0% - 33%

B. Menciptakan Kesempatan Berusaha.

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Menciptakan Kesempatan Berusaha berada pada skala 67%-100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Menciptakan Kesempatan Berusaha berada pada skala 34%-66%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Menciptakan Kesempatan Berusaha berada pada skala 01%-33%.

C. Mendorong Peran Pemerintahan Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Mendorong Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan berada pada skala 67%-100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Mendorong Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan berada pada skala 34%-66%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Mendorong Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan berada pada skala 0% - 33%

D. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berada pada skala 67%-100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berada pada skala 34%-66%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berada pada skala 0% - 33%

E. Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Desa.

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Desa berada pada skala 67%-100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Desa berada pada skala 34%-66%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Desa berada pada skala 0% - 33%

F. Memberikan Kesempatan Usaha.

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Memberikan Kesempatan Usaha ada di skala 67%-100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Memberikan Kesempatan Usaha ada di skala 34%-66%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Memberikan Kesempatan Usaha ada di skala 0% - 33%

G. Membuka Lapangan Kerja.

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Membuka Lapangan Kerja ada di skala 67%-100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Membuka Lapangan Kerja ada di skala 34%-66%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Membuka Lapangan Kerja ada di skala 0% - 33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai

suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang bagaimana Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang di teliti. (Sugiono, 2016;63). Kemudian metode yang di gunakan di dalam penyusunan penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. Hal ini di sebabkan Karena metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012;8) dapat diartikan sebagai Metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada penggunaan angka-angka yang membuatnya lebih mendetai dan jelas, selain itu penggunaan tabel, grafik dan juga diagram sangat memudahkan untuk di baca. (Sugiyono, 2012;8)

B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Alasan penulis melakukan penelitian di Desa ini adalah bahwa penulis menemukan fenomena bahwa belum efektifnya Fungsi Badan Usaha Miliki Desa Terantang

Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

2. Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya, yang menjadi pelaksana tugas dalam melakukan kegiatan simpan-pinjam.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012;90).Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi,2012;254).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Direktur, Kepala Unit Usaha, Staf Administrasi, Pengawas Kecamatan, dan Masyarakat.

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Evaluasi Fungsi Badan Usaha Miliki Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)

1	Kepala Desa Teratang Manuk	1	1	100%
2	Sekretaris Desa Teratang Manuk	1	1	100%
3	Direktur BUMDes Teratang Manuk	1	1	100%
4	Staf Administrasi BUMDes	1	1	100%
5	Staf Analisis Kredit BUMDes	1	1	100%
6	Nasabah Peminjam Dana Bumdes Desa Teratang Manuk	127	50	40 %
	Jumlah	132	55	40 %

Sumber : Hasil Modifikasi Tahun 2019

Penelitian yang membahas Evaluasi Fungsi Badan Usaha Miliki Desa Teratang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Teratang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Memiliki Sampel yaitu Kepala Desa yang berjumlah 1 Orang, Sekretaris Desa berjumlah 1 orang dengan persentase 100%, Direktur BUMDes sebanyak 1 Orang dengan persentase 100%, Staf Analisis Kredit berjumlah 1 Orang dengan persentase 100%, Staf Administrasi berjumlah 1 Orang dengan persentase 100% dan Masyarakat berjumlah sebanyak 50 Orang yang di jadikan sampel dalam penetian ini.

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkim mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan

waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk BUMDes Terantang Manuk Jaya digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota BUMDes.
- b. Untuk Masyarakat digunakan teknik Purposive sampling, pemilihan sample berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa siapa saja yang pantas untuk dijadikan sampel.

E. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah melalui beberapa sumber data yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden
- b. Hasil Wawancara Dengan Responden.
- c. Tanggapan responden tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada

Badan Usaha Milki Desa Terantang Manuk Jaya. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Sejarah singkat Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian
- c. Struktur Organisasi BUMDes Terantang Manuk Jaya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Tarantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

- b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik

yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian ini dimulai dari tahun 2019. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel III.3 : Perincian jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Miliki Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi

**Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangakalan Kuras Kabupaten
Pelalawan**

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																							
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																								
2	Ujian Proposal																								
3	Revisi Proposal																								
4	Kuisisioner																								
5	Rekomendasi survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Pengandaan Skripsi																								

Sumber: Data Olahan Penulis, 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Sejarah Singkat Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada di pinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940 -1945.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Pelalawan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar dengan ibukota berkedudukan di Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan didasarkan kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai, dan alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan sebagai Kabupaten yang berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Kabupaten Kampar.

1. Keadaan Geografis

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Pelalawan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar dengan ibukota berkedudukan di Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan didasarkan kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai, dan alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan sebagai Kabupaten yang berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Kabupaten Kampar, yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor Tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah Pelalawan

Secara geografis luas Kabupaten Pelalawan adalah 13.822,10 km², yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-Pulau kecil lainnya. Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintas Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatra yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur dan Kabupaten Karimun

Wilayah Kabupaten Pelalawan memiliki iklim tropis dengan kondisi topografi daerah yang mempunyai ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 2 M s.d 40 M. Daerah atau kota yang tertinggi adalah Langgam, Pangkalan Kerinci, Sorek I, Pangkalan Lesung, Ukui, Bandar Seikijang dengan tinggi diatas 30 M dan yang terendah adalah Teluk Dalam dengan tinggi 2 M.

3. Jumlah dan Penyebaran Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2016 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan berjumlah 428.150 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 219.754 jiwa (51,33%) dan perempuan sebesar 208.396 jiwa (48,67%) dengan 103.164 kepala keluarga.

Tabel 4.1 : Penyebaran jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan 2016

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah KK	Penduduk				Jiwa/ km ²
				Laki-laki	Perem.	Jumlah	%	
1	Langgam	1,453.07	7,325	16,119	15,128	31,247	7.30	21.50
2	Pangkalan Kerinci	195.32	28,333	61,416	58,922	120,338	28.11	616.11
2	Bandar Sei Kijang	306.87	7,945	18,306	17,080	35,386	8.26	115.31
4	Pangkalan Kuras	1,200.08	14,557	30,727	29,248	59,975	14.01	49.98
5	Ukui	1,345.19	10,067	20,853	18,924	39,777	9.29	29.57
6	Pangkalan Lesung	509.29	8,056	16,611	15,504	32,115	7.50	63.06
7	Bunut	423.00	3,943	7,887	7,760	15,647	3.65	36.99
8	Pelalawan	1,482.65	4,844	10,379	9,476	19,855	4.64	13.39
9	Bandar Petalangan	372.31	3,631	7,161	7,127	14,288	3.34	38.38
10	Kuala Kampar	698.36	4,288	9,218	8,873	18,091	4.23	25.90
11	Kerumutan	956.84	6,045	12,304	11,815	24,119	5.63	25.21
12	Teluk Meranti	4,212.82	4,130	8,773	8,539	17,312	4.04	4.11
	Jumlah	13,155.79	103,164	219,754	208,396	428,150	100.00	32.54

Sumber : Kabupaten Pelalawan tahun 2017

Penyebaran penduduk tidak merata di setiap kecamatan. Penyebaran penduduk yang paling padat sebesar 616,11 jiwa/km² berada pada Kecamatan Pangkalan Kerinci dan yang paling jarang sebanyak 4,11 jiwa/km² di Kecamatan Teluk Meranti. Tingkat rata-rata penyebaran penduduk dibandingkan luas

wilayah Kabupaten Pelalawan adalah 32,54 jiwa/km². Untuk mendorong penyebaran penduduk yang lebih merata pada masing-masing kecamatan, pemerintah daerah akan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan perdagangan yang baru di kecamatan yang penduduknya masih jarang dan yang memiliki keunggulan ekonomis serta potensi daerah.

4. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data kependudukan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2016 sebanyak 428.150 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 219.754 jiwa (51,33%) dan perempuan sebesar 208.396 jiwa (48,67%).

Tabel 4.2 : Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2016

No	Umur	Jumlah	%	Laki-laki	%	Perempuan	%
1	0-4	53.620	12,52	26.751	12,17	26.869	12,89
2	5-9	45.837	10,71	23.147	10,53	22.690	10,89
3	10-14	38.096	8,90	19.120	8,70	18.976	9,11
4	15-19	34.596	8,08	17.662	8,04	16.934	8,13
5	20-24	39.797	9,30	19.741	8,98	20.056	9,62
6	25-29	45.349	10,59	23.160	10,54	22.189	10,65
7	30-34	40.896	9,55	21.073	9,59	19.823	9,51
8	35-39	36.084	8,43	18.780	8,55	17.304	8,30
9	40-44	30.143	7,04	16.013	7,29	14.130	6,78
10	45-49	22.178	5,18	12.085	5,50	10.093	4,84
11	50-54	16.007	3,74	8.671	3,95	7.336	3,52
12	55-59	10.887	2,54	6.008	2,73	4.879	2,34
13	60-64	6.716	1,57	3.537	1,61	3.179	1,53
14	65-69	3.740	0,87	2.008	0,91	1.732	0,83
15	70-74	2.157	0,50	1.100	0,50	1.057	0,51
16	75+	2.047	0,48	898	0,41	1.149	0,55
	Jumlah	428.150		219.754		208.396	

Sumber : Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

Tabel 4.3 : Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2016

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0 – 4	25,791	25,924	51,715
2.	5 – 9	22,080	21,568	43,648
3.	10 - 14	18,321	18,222	36,543
4.	15 - 19	16,889	16,242	33,131
5.	20 - 24	19,196	19,516	38,712
6.	25 - 29	22,023	21,099	43,122
7.	30 - 34	20,093	19,012	39,105
8.	35 - 39	18,070	16,475	34,545
9.	40 - 44	15,024	13,182	28,206
10.	45 - 49	11,209	9,345	20,554
11.	50 - 54	7,996	6,761	14,757
12.	55 - 59	5,502	4,433	9,935
13.	60 - 64	3,177	2,849	6,026
14.	65 - 69	1,801	1,570	3,371
15.	70 - 74	1,018	981	1,999
16.	75 +	827	1,058	1,885
JUMLAH		209,017.00	198,237.00	407,254.00

Sumber: Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2017

Secara umum, penduduk Kabupaten Pelalawan bekerja sebagai petani dan nelayan. Kondisi ini selaras dengan karakteristik wilayah Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari daratan dan beberapa pulau. Komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan.

No.	Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan	Jiwa	%
1	Pertanian dan Perikanan	59,70	44,58	225.293	55,32
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
3	Industri	10,40	1,18	31.481	7,73
4	Listrik, Gas dan Air	0,73	0,34	2.525	0,62
5	Bangunan dan Konstruksi	4,17	1,17	13.439	3,30
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel	7,94	24,17	51.477	12,64
7	Transportasi dan Komunikasi	4,89	-	14.172	3,48
8	Keuangan dan Asuransi	1,99	1,87	7.941	1,95
9	Jasa	10,18	26,69	60.925	14,96
	Jumlah	100	100	407.254	100

Sumber: Diolah dari Pelalawan Dalam Angka 2017.

Komposisi penduduk yang bekerja sebagai petani dan nelayan (sektor

pertanian dan perikanan) mencapai 55,32 persen meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 55,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan dan kesejahteraan penduduk sangat tergantung pada hasil alam yang rentan terhadap perubahan topografi darat dan laut. Ke depan, program pengembangan sektor pertanian dan perikanan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jika sektor ini dikelola dengan baik maka dampak topografi yang tidak mendukung seperti musim angin utara, musim hujan dan musim kemarau dapat diminimalkan.

5. Keadaan Tingkat Pendidikan dan Sarana Pendukung

Meskipun kekayaan alam Kabupaten Pelalawan diperkirakan cukup memadai beberapa tahun ke depan, kondisi tersebut tidak menjamin bahwa Kabupaten Pelalawan akan mampu bersaing dengan pemerintah daerah lain yang sudah lebih dahulu membenahi SDM-nya. Oleh karena itu, selain menatausahakan kekayaan alam dengan profesional diperlukan juga SDM yang handal di bidangnya sehingga kekayaan alam yang melimpah dapat diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 : Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

No	Uraian	Jumlah Penduduk	Jumlah	
			Jiwa	%
1	Belum Sekolah	407.254,00	11.810,37	2,90
2	Belum Tamat SD		80.269,76	19,71
3	SD		118.714,54	29,15
4	SLTP		81.898,78	20,11
5	SMA		96.682,10	23,74
6	Diploma		4.194,72	1,03
7	Sarjana		13.683,73	3,36
	Jumlah		407.254,00	100,00

Sumber: Diolah dari Pelalawan Dalam Angka 2017

Berdasarkan data tersebut di atas, komposisi penduduk menurut tingkat

pendidikan belum memadai di Kabupaten Pelalawan, karena penduduk yang telah melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi hanya 4,39% dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pelalawan. Sedangkan sisanya sebesar 95,61% belum pernah mengecap pendidikan perguruan tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Pelalawan akan terus mengintensifkan program pendidikan Pelalawan Cerdas yaitu upaya memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan SDM, dengan menjalankan program pendidikan gratis 12 tahun, menghilangkan pungutan di sekolah, serta penyediaan perlengkapan sekolah bagi siswa miskin, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru dan kualitas proses belajar mengajar. Pada tingkat pendidikan tinggi, Pemerintah Daerah telah memfasilitasi berdirinya Akademi Komunitas Negeri Pelalawan, dan hingga saat ini telah menghasilkan lulusan sarjana sebanyak 94 orang yang siap kerja. Selain itu juga Pemerintah Daerah telah memfasilitasi berdirinya Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan. Tepat pada tanggal 4 Agustus 2016 telah dilakukan Soft Opening Kampus Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan.

Selain melaksanakan fungsi pengajaran dan fungsi penelitian, ST2P juga melaksanakan berbagai aktivitas terkait dengan upaya menumbuhkembangkan kewirausahaan dan menciptakan pengusaha pemula berbasis teknologi serta menjadi penghubung timbal balik antara masyarakat dan dunia usaha dengan para inovator dan inventor. Terhitung sejak tanggal 5 September 2016 telah dilakukan perkuliahan perdana bagi 35 orang mahasiswa strata 1 Program Studi Teknik Industri dan Agro Teknologi.

Kondisi prasarana dan sarana pendidikan, jumlah siswa dan tenaga

pendidik di Kabupaten Pelalawan sampai dengan tahun 2016 dapat terlihat pada tabel 1.6 berikut:

Tabel 4.6 : Jumlah Sarana Sekolah dan Siswa SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

NO	KECAMATAN	SD/MI			JML SISWA	SLTP/MTs			JML SISWA	SMA/SMK		JML SISWA
		N	S	MI		N	S	MTs		N	S	
1	Pangkalan Kerinci	14	12	1	12,726	4	9	3	4,662	4	7	4,432
2	Pangkalan Kuras	28	4	0	8,903	8	1	3	3,368	3	1	1,880
3	Kuala Kampar	24	0	1	2,344	7	0	1	790	2	0	491
4	Ukui	19	5	1	5,248	5	1	4	1,759	2	2	786
5	Kerumutan	21	0	0	3,036	4	0	1	853	2	0	659
6	Langgam	17	1	1	4,724	4	0	4	1,411	3	1	862
7	Pelalawan	14	2	0	2,137	6	0	0	373	1	0	74
8	Teluk Meranti	14	0	0	1,927	4	1	1	715	3	0	424
9	Pangkalan Lesung	14	1	0	3,454	3	0	4	1,109	2	0	970
10	Bunut	14	1	0	2,009	2	0	1	735	2	0	650
11	Bandar Petalangan	11	2	0	2,205	1	2	0	776	1	1	575
12	Bandar Sei Kijang	8	1	0	2,690	3	0	1	1,123	2	1	931
	JUMLAH	198	29	4	51,403	51	14	23	17,674	27	13	12,734
	TOTAL		231				88			40		

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Pelalawan Tahun 2017.

Dari tabel diatas sampai dengan tahun 2017 jumlah sekolah dasar (SD/MI) adalah sebanyak 231 dengan jumlah siswa 51.403 orang, dan jumlah SMP/MTs sebanyak 88 sekolah dengan jumlah siswa 17.674 orang serta jumlah SMA/SMK sebanyak 40 sekolah dengan jumlah siswa 12.734 orang yang tersebar di dua belas kecamatan.

Indikator mendasar tingkat pendidikan juga diukur dari kemampuan baca-tulis penduduk dewasa. Kemampuan baca-tulis tercermin dari data angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas huruf latin dan huruf lainnya. Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pelalawan tahun 2016, persen penduduk yang dapat membaca dan menulis (melek huruf) tahun 2015 sebesar 98,87 % dan persentase penduduk yang buta huruf adalah sebesar 1,13 %. Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang buta huruf lebih besar dibanding penduduk laki-laki, yaitu 1,84% berbanding 0,45%.

Potensi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pelalawan relatif besar

dan masih sebagian kecil yang dikelola. Luas potensi lahan sawah dan bukan sawah s.d. tahun 2014 adalah 853.815 ha yang terdiri dari lahan sawah 7.439 ha dan non sawah 846.376 ha. Lahan sawah berada pada 10 kecamatan yaitu Langgam, Pangkalan Kuras, Ukui, Pangkalan Lesung, Bunut, Pelalawan, Bandar Petalangan, Kuala Kampar, Kerumutan, dan Teluk Meranti. Sedangkan non sawah tersebar di semua kecamatan.

Tabel 4.7 : Produksi Pertanian di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

No	Kecamatan	Padi		Palawija		Sayuran		Jumlah	%
		Luas	Ton	Luas	ton	Luas	Ton		
a	b	c	d	e	f			g	h=(Σ/g)
1	Langgam	2	4,99	29	422	122	514	1.094	2,08
2	Pangkalan Kerinci	-	-	17	378	107	1340	395	0,75
3	Bandar Sei Kiajang	-	-	45	259	58	2086	304	0,58
4	Pangkalan Kuras	108	435,23	435	41	122	418	1.019	1,94
5	Ukui	2	5,60	60	787	78	738	854	1,63
6	Pangkalan Lesung	76	212,80	33	687	24	1025,5	1.009	1,92
7	Bunut	24	70,73	13	223	48	246	330	0,63
8	Pelalawan	63	200,18	16	145	29	1350	424	0,81
9	Bandar Petalangan	236	778,46	17	334	69	233	1.365	2,60
10	Kuala Kampar	5.960	26.162,69	2.263	6.196	37	382	40.582	77,22
11	Kerumutan	260	968,44	100	961	102	1045,2	2.290	4,36
12	Teluk Meranti	334	1.273,88	297	985	12	235	2.889	5,50
	Jumlah	7.065	30.113,00	3.325	11.416	808	9.613	52.555	100,00
	%	13,44	57,30	6,33	21,72	1,54	18,29	100,00	

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

Jenis tanaman yang mungkin dikembangkan di Kabupaten Pelalawan adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, terong, mentimun, kangkung, dan bayam. Sedangkan untuk tanaman perkebunan atau tanaman keras seperti, kelapa, karet dan kelapa sawit. Distribusi luas tanaman perkebunan produktif dan hasil produktif diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.8: Distribusi Luas Tanaman Perkebunan Produktif dan Hasil

Produksi Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

No	Kecamatan	Karet		Kelapa		Kelapa Sawit		Luas	%
		Ha	Ton	Ha	Ton	Ha	Ton		
a	b	c	d	e	f	e	f	g	h=(\sum g)
1	Langgam	2.552	3.297	51,60	45	11.656	42.100	14.260	8,76
2	Pangkalan Kerinci	216	309	36,11	56	4.632	17.198	4.885	3,00
3	Bandar Sei Kiajang	684	957	25,95	33	13.255	50.969	13.966	8,58
4	Pangkalan Kuras	5.179	7.274	109,86	168	17.652	69.494	22.941	14,09
5	Ukui	864	1.204	55,20	80	14.274	56.063	15.192	9,33
6	Pangkalan Lesung	1.975	2.774	40,99	58	11.295	45.533	13.311	8,18
7	Bunut	3.291	4.449	30,20	41	6.745	25.740	10.065	6,18
8	Pelalawan	2.298	3.153	29,65	40	9.337	33.717	11.664	7,16
9	Bandar Petalangan	2.022	2.778	44,99	65	6.753	26.012	8.820	5,42
10	Kuala Kampar	1.457	600	14.552	14.033	2.226	7.809	18.235	11,20
11	Kerumutan	2.582	3.440	94,00	115	13.980	53.442	16.655	10,23
12	Teluk Meranti	3.672	4.539	1.817	2.696	7.327	24.938	12.815	7,87
	Jumlah	26.791	34.775	16.887	17.430	119.132	453.016	162.810	100,00
	%	16,46		10,37		73,17		100,00	

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan.

Selain potensi pertanian dan perkebunan tersebut, terdapat potensi kehutanan yang dapat dikembangkan. Luas kawasan hutan di Kabupaten Pelalawan sebesar 785.628,82 ha dengan rincian terdapat dipada tabel dibawah:

Tabel. 4.9 : Luas Kawasan Hutan Kabupaten Pelalawan.

No	Jenis Hutan	Luas (ha)
1	Hutan Produksi Tetap	466,701.92
2	Hutan Produksi Tetap Penyangga	6,274.41
3	Hutan Rakyat	5,130.76
4	Hutan Lindung	5,644.71
5	Kawasan Bergambut	155,349.89
6	Taman Nasional	101,493.19
7	Suaka Margasatwa	37,128.30
8	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	1,399.14
9	Sempadan Sungai	5,516.60
10	Sempadan Pantai	989.90
	Jumlah	785,628.82

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Pelalawan

B. Profil Desa Terantang Manuk

Desa terantang manuk adalah sebuah desa yang dahulunya sangat terpencil dan sangat terisolir mengikuti aliran tepi sungai dan disebut juga sebagai desa terantang manuk dalam, tetapi dengan adanya pembangunan jalan pertamina, banyak masyarakat yang pindah dari tepi sungai ke tepi jalan pertamina, maka berubahlah nama Desa menjadi Desa Terantang Manuk, pada saat itu desa terantang manuk mulai nampak pembangunannya apalagi dengan adanya perkebunan kelapa sawit dan tanaman industri dari berbagai perusahaan baik itu perusahaan BUMN, BUMD, dan juga pihak Swasta yang ada di sekitarnya.

Desa terantang manuk dahulunya merupakan desa yang di pimpin oleh seorang penghulu yang bernama pak makal, pada tahun 1996/1970 di adakanlah pemilihan Desa untuk pertama kalinya dan dipercayakan kepada bapak H.Sigim sebagai kepala desa sampai tahun 1998, selanjutnya dijabat oleh H.Umar Gem (Alm) sebagai kepala desa dan Bakri sebagai Sekdes (1990-2005), kemudian Desa Terantang Manuk terus berkembang dengan kepala desanya adalah berikut:

- Tahun 2005 – 2006 adalah Bapak Bakri sebagai Plt Kepala Desa
- Tahun 2007- 2012 adalah Almsyah sebagai Kepala Desa dan Suardi Sebagai Kadesnya.
- Tahun 2013, di gantikan oleh Suardi sebagai Plt Kepala Desa.
- Tahun 2013-Sekarang dijabat oleh Bapak Bakri sebagai kepala Desa terpilih.

Desa Terantang Manuk merupakan bagian dari Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan luas administrasi yaitu 13.500 Km2, kawasan desa ini terletak di dataran sedang dan berada pada posisi jalan Negara yaitu jalan lintas timur sumatera, jarak desa Terantang Manuk dengan ibu kota Kecamatan adalah sejauh 15 KM, sedangkan jarak dari Desa Terantang

Manuk ke Ibu Kota Kabupaten Pelalawan yaitu sebanyak 35 KM, dan jarak ke Ibu Kota Provinsi Riau adalah sejauh 100 KM, desa ini dapat di tempuh dengan menggunakan jalur darat saja.

Desa Terantang Manuk memiliki sumber daya alam yang cukup banyak dan merupakan modal utama sebagai pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam tersebut di antaranya adalah: lahan perkebunan yang sangat subur, yaitu dengan luas kurang lebih 8210 Ha dan wilayah sebagian besarnya menjadi wilayah perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat ataupun pihak swasta.

Untuk menjalankan roda pemerintahan di Desa Terantang Manuk, pemerintah membuat Visi dan Misi desa sebagai mana adalah:

1. Visi Desa Terantang Manuk :

“Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang agamis, adil, makmur, dan berbudaya”.

Rumusan visi yang telah di paparkan di atas adalah suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki system dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa sumber Terantang Manuk yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Misi Desa Terantang Manuk:

- a. Melakukan reformasi system kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat:
- b. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk bentuk penyelewengan lainnya:

- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM, Wiraswasta, Petani, dan Kelompok Tani;
- e. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi Desa yang maju dan mandiri.

C. Profil BUMDesa Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Terantang Jaya di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras.

Program pemberdayaan Desa/Kelurahan adalah salah satu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya percepatan penyelesaian rendahnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan komitmen dan kewajiban oleh Pemerintah, sesuai dengan agenda utama Nasional (Propenas) dan Keputusan Gubernur Riau Nomor 592/132/III/IX/2004 dalam upaya mempercepat proses pengentasan kemiskinan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Riau melalui surat keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts/132/III/2005 Tanggal 31 Maret 2005 mengeluarkan kebijakan untuk program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui Sharing APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat Desa/Kelurahan sebagai dana bergulir.

Desa terantang manuk yang berada di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu alokasi penerimaan pemberdayaan Desa (PPD) yang menerima bantuan dana usaha Desa/Kelurahan. Berdasarkan kebijakan tersebut maka melalui rapat kelurahan dan LPM dibentuklah salah satu usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam (BUMDESA) Terantang Jaya berdasarkan pedum dan juknis program dari BBPM Provinsi Riau.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, jadi data-data yang di dapat dalam penelitian ini bersumber dari masyarakat sebagai nasabah BUMDes dan juga penulis melakukan wawancara dengan aparatur BUMDes dan menyebarkan kuesioner kepada nasabah BUMDes Desa Terantang Manuk Jaya sebanyak 50 orang.

Sehubungan dengan penelitian tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan Pendidikan. Identitas responden ini diperlukan untuk mempermudah penulis dalam mengolah data yang disajikan dalam bentuk tabel. Selain itu penulis menilai bahwa pentingnya penulis untuk mengetahui usia dan pendidikan responden, karena hal ini akan dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap penelitian penulis. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang identitas responden. Usia yang penulis pilih dijadikan sebagai kriteria tentunya sudah menanjak dewasa dan memiliki pemikiran sendiri dan sudah bisa memilih mana yang baik dan yang benar. Dan jika pendidikan penulis tidak bisa membuat kriteria karena tergantung penulis temui di lapangan tentunya masyarakat yang

merupakan nasabah dari BUMDes Terantang Manuk Jaya. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis paparkan yang dimulai dari identitas responden jenis kelamin nasabah BUMDes:

I. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, serta dengan cara penyebaran kuesioner maka identitas responden adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Nasabah BUMDes

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	27	54%
2	Perempuan	13	26%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden Nasabah BUMDes yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 27 orang dengan persentase 54%, sedangkan untuk responden yang memiliki jenis kelamin Perempuan berjumlah 13 orang dengan persentase 26%, dari total keseluruhan responden nasabah yaitu 50 orang.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Identitas ke dua yang penulis peroleh dari lapangan adalah berdasarkan latar belakang usia. Usia merupakan salah satu penentu dalam pelaksanaan

penelitian ini, karena semakin matang usia seseorang maka cara berfikirnya pun tentunya sudah berbeda dengan seseorang yang belum memiliki cukup umur. Dari hasil penelitian tentang tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Nasabah BUMDes

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	12	24%
2	31-40 Tahun	22	44%
3	41-50 Tahun	15	30%
4	>50 Tahun	1	2%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.2 diatas dinyatakan bahwa responden dari Nasabah BUMDes, responden yang paling banyak, usia 31-40 Tahun sebanyak 22 orang dengan persentase 44% dan usia pada 41-50 Tahun yang berjumlah 15 orang dengan persentase 30%, selanjutnya usia 20-30 Tahun berjumlah 12 orang dengan persentase 24%, sedangkan usia yang paling minim adalah usia >50 sebanyak 1 orang (2%). Hal ini dikarenakan karena pada saat penulis di lapangan, penulis menemui reponden yang memiliki usia rata-rata pada interval 31-40 Tahun, selain itu usia 31-40 ini adalah usia yang produktif untuk melakukan berwirausaha walaupun kecil-kecilan.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dan identitas yang ketiga yang penulis dapatkan dari lapangan berdasarkan latar belakang pendidikannya, rata-rata responden memiliki pendidikan SMA. Pendidikan sangat mempengaruhi cara sudut pandang seseorang, baik itu dalam memberikan pendapat maupun dalam melakukan suatu tindakan. Dari hasil penelitian tentang tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang Jenjang Pendidikan berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Nasabah BUMDes

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	2	4%
3	SMA	40	80%
4	Diploma	0	0%
5	Sarjana S1/S2	8	16%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Supir Truck adalah yang menjadi sampel dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten

Pelalawan dominannya adalah pendidikan SMA yaitu berjumlah 40 orang dengan persentase 80%, responden yang memiliki pendidikan SMP berjumlah 2 orang dengan persentase 4%, sedangkan responden yang paling minim memiliki pendidikan S1 yaitu berjumlah 8 orang dengan persentase 10%.

B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indikator Variabel Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus diberikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi (Harbani Pasolong (2013 : 131)). Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah berdasarkan Peraturan Daerah No. 37 Tahun 2012 pasal 3. Dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini yang pertama adalah: Memantapkan Kelembagaan Perekonomian Desa, Menciptakan Kesempatan Berusaha, Mendorong Peran Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Kemiskinan, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Desa, Memberikan Kesempatan Usaha, Membuka Lapangan Kerja. Dan di dalam setiap indikatornya akan dilengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu pembahas akan menganalisis tentang indikator

Memantapkan kelembagaan perekonomian desa, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan juga penjelesan-penjelasan yang didukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan baik di kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Berikut hasil penelitian penulis yang disajikan dalam bentuk tabel:

1. Memantapkan Kelembagaan Perekonomian Masyarakat

Memantapkan kelembagaan perekonomian masyarakat di sini adalah menetapkan kelembagaan Desa, dimana setiap Desa harus memiliki lembaga yang dapat memberikan pemberdayaan kepada masyarakatnya. Untuk memantapkan kelembagaan perekonomian masyarakat tersebut yang dilakukan pertama kali adalah mengukuhkan lembaga dengan legalitas yang jelas, selain itu harus dibentuk tim pengawasan serta memiliki petunjuk teknis dalam melaksanakan proses peningkatkan masyarakat tersebut. Tim pengawasan ini dibentuk untuk mengawasi jalan dari proses lembaga tersebut, dimulai dari awal pembentukan pengurus, penyusunan rencana program yang dibuat, rincian biaya, serta pengeluaran anggaran untuk menjalankan program yang sudah direncanakan. Setelah itu tim pengawas juga harus melihat perkembangan secara berkala terhadap lembaga yang sudah didirikan, dilihat dari kesesuaian realisasi program dengan perencanaan program.

Di dalam indikator ini ada dua poin penilaian sebagai pendukung indikator pertama ini yaitu, membentuk tim pengawas dan pembimbing yang memiliki pendidikan yang tinggi, serta memiliki petunjuk teknis yang jelas untuk menjalankan kegiatan BUMDes.

Tabel V.4 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Nasabah BUMDes terhadap Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Membentuk Tim Pengawas Dan Pembimbing Yang Memiliki Pendidikan Tinggi	8 (16%)	34 (64%)	8 (20%)	50 (100%)
2	Memiliki Petunjuk Teknis Yang Jelas Untuk Menjalankan Kegiatan BUMDes	14 (30%)	32 (62%)	4 (8%)	50 (100%)
Jumlah		22	66	12	100
Rata-Rata		11	33	6	50
Persentase		22%	66%	12%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.4 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh Nasabah BUMDes Terantang Jaya yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 11 orang dan persentasenya adalah 22%. Alasan nasabah BUMDes menilai bahwa Tim Pengawas dan Pembimbing pada setiap Desa sudah memiliki pendidikan tinggi yaitu minimal S1 dan sudah memiliki petunjuk teknisnya.

Sedangkan repsonden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 33 orang dengan persentase 66%. Adapun alasan yang diberikan oleh responden terkait dengan jawaban tersebut adalah dikarenakan bahwa pihak Nasabah menilai bahwa tim pengawas yang sudah dibentuk oleh manajemen BUMDes Terantang Jaya telah memiliki Sumber Daya Manusia yang

kompeten untuk menjalankan fungsinya dalam menjalankan system pengawasan terhadap operasional BUMDes Terantang Jaya di Desa Terantak Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras.

Dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” adalah rata-rata 6 orang dengan persentase 12%. Hal ini dikarenakan bahwa nasabah tidak mengetahui tim pengawasan dan pembimbing BUMDes ini memiliki standar pendidikan yang seperti apa, dan begitu juga pada petunjuk teknis yang ada, bahwa pihak BUMDes tidak pernah mensosialisasikan Petunjuk teknis tersebut.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden nasabah dari BUMDes Terantang Jaya di atas, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari masing-masing informan yang berguna untuk melengkapi hasil dari penelitian ini, dimana masing-masing informan yang telah penulis wawancarai adalah Sekretaris Desa Terantang Manuk, yaitu Bapak Suardi, Direktur BUMDes Terantang Jaya, yaitu Bapak Janri, S.T. Staff Analisis Kredit Ibu Nursiti Fadilah, dan yang terakhir adalah Ibu Desmawati sebagai Staf Administrasi dari BUMDes Terantang Jaya, dan adapun hasil wawancara yang pertama penulis sajikan adalah dengan Direktur BUMDes Terantang Jaya yaitu Bapak Janri S.T. yang mana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Tentu memiliki system pengawasan, kita terus melakukan audit dan analisis terhadap kegiatan yang dilakukan oleh nasabah-nasabah kita, sejauh mana proses kredit yang jalankan, apakah lancar atau justru mengalami kendala, apabila memang mengalami kendala,

tentunya kita akan panggil dan meminta keterangan terkait dengan permasalahan si nasabah tadi, karna masalah yang mereka sedang alami, berpengaruh dengan system keuangan pada BUMDes Terantang Jaya yang kami kelola” (Wawancara tanggal 09 Januari 2019, Bapak Janri, S.T Direktur BUMDes Terantang Jaya)

Sementara untuk jawaban yang diberikan oleh pihak tim analisis kredit yang berkerja di BUMDes Terantang Jaya, yaitu ibu Nursiti Fadilah memberikan keterangannya terkait dengan pembentukan tim pengawas yang ada di dalam BUMDes Terantang Jaya itu sendiri, dan adapun tanggapan yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan penulis, adalah sebagai berikut:

“Dalam prosesnya, saya sendiri adalah sebagai orang yang bertanggung jawab kepada direktur terkait dengan proses kredit yang berjalan dan proses kredit yang akan di cairkan, pengawasan yang dilakukan bukan bersifat langsung turun kelapangan, tetapi sifatnya hanya analisis data yang masuk, karna kan kita punya catatan terkait dengan pembayaran dan juga tunggakan yang dilakukan oleh masing-masing nasabah kita, dengan mikian maka dengan mudah kita melakukan pemantauan terhadap kelancaran kredit mreka, apabila nantinya dilihat ada kredit yang sudah tidak sehat, maka akan dilakukan pemanggilan terhadap nasabah tersebut dan tentunya mencari jalan keluar dari masalahnya” (Wawancara tanggal 09 Januari 2019, Ibu Nursiti Fadilah, Staf Analisis Kredit BUMDes Terantang Jaya, Desa Terantang Manuk)

Permasalahan terkait dengan pengelolaan system yang ada pada BUMDes Terantang Jaya Desa Terantang Manuk bukan hanya menjadi permasalahan pada anggota organisasi itu sendiri, melainkan pertanggung jawaban yang harus juga diberikan kepada pihak Desa sebagai laporan wajib, dan untuk mencari jawaban guna melengkapi hasil penelitian ini, penulis juga telah melakukan wawancara dengan pihak perwakilan Kantor Kepala Desa Terantang Manuk yaitu Bapak Suardi sebagai Sekretaris Desa, yang mana beliau memberikan tanggapannya terkait pertanyaan penulis adalah sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaannya tentu saja sudah di atur dalam SOP nya masing-masing, pembagian tugas masing-masing, ada yang bertanggung jawab secara keseluruhan, yaitu direktornya, ada yang mengurus analisis kredit nya, pengawasan terhadap nasabahnya, bagian administrasinya, semuanya sudah di susun dalam struktur organisasinya, saya rasa semua kaitannya dengan pelaksanaan terkait dengan petunjuk teknis terhadap menjalankan roda organisasinya sudah cukup jelas dan bisa ditanyakan langsung kepihak BUMDes Terantang Jaya itu sendiri. Jika tidak ada petunjuk dalam pelaksanaannya, tentunya mereka sudah gulung tikar dan merugi” (Wawancara tanggal 09 Januari 2019, Bapak Suardi, Selaku Sekretaris Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kurang)

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis dapatkan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan dari masing-masing hasil wawancara yang telah dilakukan adalah dimana proses pelaksanaan terkait dengan pembagian tugas dan petunjuk teknis dalam menjalankan roda organisasi dari BUMDes Terantang Jaya itu sudah dilengkapi dan berjalan sesuai dengan prosedurnya.

Tetapi berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak BUMDes Terantang Jaya belum berjalan cukup baik, hal ini tentunya diperjelas dengan data yang memberikan keterangan dimana masih banyak nasabah dari BUMDes terantang jaya yang melakukan penunggakan.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian penulis terkait dengan indikator yang ke 2 (dua) yaitu membahas tentang “Menciptakan Kesempatan Berusaha”, dimana hasil dari penelitiannya adalah sebagai berikut:

2. Menciptakan Kesempatan Berusaha

Diharapkan dengan adanya lembaga BUMDes ini dapat menciptakan kesempatan berusaha atau memiliki usaha dengan cara memberikan bantuan berupa modal dan harus dibimbing bagaimana cara menggunakan bantuan modal yang diberikan bisa dapat mengembangkan usaha dan tidak disalahgunakan.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang membahas tentang indikator yang ke dua yaitu indikator yang membahas tentang “Menciptakan Kesempatan Berusaha” yang memiliki pembahasan pada masing-masing Sub Item Penilaian dilengkapi dengan masing-masing analisisnya, dan adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

Tabel V.5 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Nasabah BUMDes terhadap Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan Kegiatan Bumdes Dalam Simpan-Pinjam Secara Merata Dan Adil Tanpa Perbedaan	9 (18%)	28 (56%)	13 (26%)	50 (100%)
2	Memberikan Kemudahan Persyaratan Kepada Masyarakat Kurang Mampu	9 (18%)	26 (52%)	15 (30%)	50 (100%)
Jumlah		18	54	28	100
Rata-Rata		9	27	14	50
Persentase		18%	54%	28%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.5 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh Nasabah BUMDes yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 9 orang dan persentasenya adalah 18%. Alasan nasabah memberikan tanggapan pada kategori baik adalah bahwa mereka menilai

BUMDes sudah melakukan program simpan pinjam secara adil dan persyaratan yang diberikan sangat mudah dan tidak berbelit-belit

Selain itu responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 27 orang dengan persentase 54%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Nasabah BUMDes ini adalah pada kategori “Cukup Baik” adapun alasan yang diberikan oleh responden nasabah terkait dengan jawaban dominan di atas adalah dikarenakan hal ini dikarenakan bahwa pihak nasabah menilai bahwa persyaratan yang diberikan untuk meminjam uang sudah cukup mudah dan juga diarahkan dengan petugas BUMDes Terantang Jaya, tetapi masyarakat menilai belum merata bisa mendapatkan pinjaman yang disediakan oleh pihak BUMDes Terantang Jaya, karena mereka mengakui, tidak semua kalangan masyarakat bisa minjam ke BUMDes Terantang Jaya yang disebabkan harus memiliki tanggungan, sedangkan masyarakat tidak semua memiliki tanggungan yang bisa diberikan kepada BUMDes Terantang Jaya sebagai jaminan peminjaman.

Sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” adalah rata-rata 14 orang dengan persentase 28%. Hal ini dikarenakan bahwa nasabah menilai pihak BUMDes sudah melakukan simpan-pinjam, tetapi kurang tepat karena yang mendapatkan pinjaman adalah mereka yang memiliki tanggungan, seperti surat tanah. Dan persyaratan yang diberikan sebenarnya tidak sulit bagi yang memiliki tanggungan, tetapi jika tidak memiliki tanggungan mereka tidak bisa meminjam.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden nasabah dari BUMDes Terantang Jaya di

atas, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari masing-masing informan yang berguna untuk melengkapi hasil dari penelitian ini, dimana masing-masing informan yang telah penulis wawancarai adalah Sekretaris Desa Terantang Manuk, yaitu Bapak Suardi, Direktur BUMDes Terantang Jaya, yaitu Bapak Janri, S.T. Staff Analisis Kredit Ibu Nursiti Fadilah, dan yang terakhir adalah Ibu Desmawati sebagai Staf Administrasi dari BUMDes Terantang Jaya, dan adapun hasil wawancara yang pertama penulis sajikan adalah dengan Direktur BUMDes Terantang Jaya yaitu Bapak Janri S.T. yang mana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Tentunya sangat merata, siapa saja bisa mendapatkan pinjaman dan memanfaatkan dana yang tersedia di BUMDes Terantang Jaya ini, dan tentunya memiliki ketentuan yang berlaku, karna ada persyaratan yang harus di penuhi terlebih dahulu oleh calon nasabah, apabila persyaratan sudah di anggap lengkap dan layak oleh tim analisis kredit, maka pencairan dana akan segera dilakukan oleh pihak Administrasi kita, dan persyaratan tidak pernah di persulit, semua sama saja, tidak ada perbedaan sama sekali” (Wawancara tanggal 09 Januari 2019, Bapak Janri, S.T Direktur BUMDes Terantang Jaya)

Selain dari jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis juga akan menyajikan jawaban yang diberikan oleh responden penelitian lainnya yang juga berasal dari dalam BUMDes Terantang Jaya itu sendiri, yaitu ibu Nursiti Fadilah sebagai staf analisis kredit yang bekerja dengan tugas untuk menganalisis proses pengajuan kredit yang di lakukan oleh calon nasabah, dan adapun hasil wawancara yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya, persyaratannya itu sangat sederhana, dan sama dengan pengajuan pinjaman baik di Bank ataupun di tempat-tempat koperasi lainnya, tetapi yang jadi masalah adalah pada diri masyarakat itu sendiri yang mudah itu ingin di permudah lagi, kalau bisa mereka tidak harus melakukan hal apapun dan tiba-tiba mendapatkan uang, nah itu yang salah, proses pencairan dana tidak ada batasan,

maksudnya adalah tidak ada batas antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, semua bisa mendapatkan penggunaan dana dari BUMDes Terantang Jaya, tetapi kembali lagi pada point tadi, dilengkapi dulu persyaratan yang telah di tetapkan oleh pihak Pemerintah tentunya. Karna kami di sini bertugas hanya menjalankan amanat saja dan mempertanggung jawabkannya.” (Wawancara tanggal 09 Januari 2019, Ibu Nursiti Staf Analisis Kredit BUMDes Terantang Jaya)

Berdasarkan kejelasan yang diberikan oleh pihak pengurus BUMDes Terantang Jaya mengatakan bahwa proses pencairan dana yang diberikan kepada Calon Nasabah sebenarnya tidak memiliki kendala yang berarti, karna semua prosedurnya sudah cukup jelas, selama memiliki kelengkapan data yang di butuhkan maka masyarakat berhak untuk menggunakan dana tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa masyarakat mengakui bahwa mereka kesulitan dalam hal memenuhi persyaratan yang harus di siapkan dalam upaya mencairkan pinjaman dari pihak BUMDes Terantang Jaya, salah satu kendala yang di hadapi masyarakat adalah terkait dengan anggungan atau jaminan yang harus diberikan kepada pihak pengelola BUMDes Terantang Jaya, karna tidak semua masyarakat memiliki angunan yang cukup untuk memenuhi persyaratan yang di minta. Dengan demikian, fakta lain dilapangan memberikan data bahwa nasabah yang melakukan pinjaman terhadap keuangan dana bergulir dari BUMDes Terantang Jaya Desa Terantang Manuk justru dari kalangan masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki perkebunan atau jenis usaha lain, karna dengan adanya usaha yang mereka miliki, maka pihak BUMDes dengan mudah percaya bahwa mereka akan mampu membayar kredit yang akan di cair kan tersebut.

Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan mengenai indikator yang ke 3 (tiga) dimana dalam pelaksanaanya indikator ini membahas tentang “Mendorong

Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan”, adapun pembahasan tentang indikator tersebut adalah sebagai berikut:

3. Mendorong Peran Pemerintahan Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Dengan adanya lembaga peningkatan perekonomian masyarakat seperti BUMDes Terantang Jaya ini, maka diharapkan agar pihak Pemerintah Desa khususnya bisa meningkatkan kinerjanya dengan melakukan pemantauan atau pengawasan secara efektif agar BUMDes Terantang Jaya yang ada di Desa mereka bisa mencapai tujuan yaitu menanggulangi kemiskinan.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang membahas tentang indikator yang ke tiga yaitu indikator yang membahas tentang “Mendorong Peran Pemerintahan Dalam Menanggulangi Kemiskinan” yang memiliki pembahasan pada masing-masing Sub Item Penilaian, dan adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

Tabel V.6 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Nasabah BUMDes terhadap Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Keberadaan Program Bumdes	10 (20%)	32 (64%)	8 (16%)	50 (100%)
2	Memberikan Bimbingan Atau Pelatihan Kepada Tim Pembimbing	12 (24%)	30 (60%)	8 (30%)	50 (100%)
Jumlah		22	62	16	100
Rata-Rata		11	31	8	50
Persentase		22%	62%	16%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.6 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh Nasabah BUMDes Terantang Jaya yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 11 orang dan persentasenya adalah 22%. Alasan nasabah memberikan tanggapan pada ketegori baik adalah mereka menilai pihak BUMDes pernah melakukan bimbingan atau pelatihan walaupun hanya beberapa kali, dan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pihak BUMDes pernah melakukannya 1 kali, pada waktu BUMDes baru mau dijalankan.

Sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 31 orang dengan persentase 62%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Nasabah BUMDes Terantang Jaya ini adalah pada kategori “Cukup Baik” hal ini dikarenakan bahwa pihak Nasabah menilai pihak BUMDes pernah melakukan sosialisasi tentang BUMDes Terantang Jaya dan program-programnya tetapi hanya 1 kali yaitu pada saat BUMDes Terantang Jaya mulai didirikan. Ada beberapa program yang diketahui masyarakat, tetapi yang berjalan hanya bagian Simpan-Pinjam, kalau tujuannya untuk menanggulangi kemiskinan menurut masyarakat belum tercapai, dan juga uang yang dipinjamkan kepada masyarakat tidak pernah di arahkan atau dapat bimbingan, jadi dapat dikatakan program BUMDes Terantang Jaya sudah ada yang berjalan tetapi tidak optimal.

Sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” adalah rata-rata 8 orang dengan persentase 16%. Alasan responden memberikan tanggapan kurang baik adalah bahwa mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan atau bimbingan dari pihak BUMDes.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden nasabah dari BUMDes Terantang Jaya di atas, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari masing-masing informan yang berguna untuk melengkapi hasil dari penelitian ini, dimana masing-masing informan yang telah penulis wawancarai adalah Sekretaris Desa Terantang Manuk, yaitu Bapak Suardi, Direktur BUMDes Terantang Jaya, yaitu Bapak Janri, S.T. Staff Analisis Kredit Ibu Nursiti Fadilah, dan yang terakhir adalah Ibu Desmawati sebagai Staf Administrasi dari BUMDes Terantang Jaya, dan adapun hasil wawancara yang pertama penulis sajikan adalah dengan Direktur BUMDes Terantang Jaya yaitu Bapak Janri S.T. yang mana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Selalu, kita selalu sosialisasikan kepada masyarakat dan bisa saya pastikan bahwa semua masyarakat yang di Desa Terantang Manuk sudah mengetahui terkait dengan keberadaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Terantang Jaya, karna pada saat awal di didirkanpun, masyarakat kita berikan sosialisasi dan kita kumpulkan untuk memusyawarahkan terkait dengan proses dimulainya BUMDes Terantang Jaya ini” (Wawancara tanggal 09 Januari 2019, Bapak Janri, S.T Direktur BUMDes Terantang Jaya)

Diluar dari jawaban yang telah di paparkan di atas, penulis tertarik untuk menanyakan perihal item penilaian yang ke dua, dimana hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bimbingan atau pelatihan kepada nasabah yang melakukan pinjaman di BUMDes UED-SP Terantang Jaya, adapun kaitannya dengan pertanyaan tersebut, akan di jawab langsung oleh Bapak Suardi selaku Sekretaris Desa Terantang Manuk, yang juga memiliki wewenang untuk memberikan pengawasan kepada pelaksanaan kegiatan di internal BUMDes itu sendiri, dan jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“saya rasa hal tersebut sifatnya tergantung dari situasi si nasabah itu sendiri, mungkin kalau nasabahnya yang melakukan pinjaman baru membuka usaha untuk pertama kali, kita bisa berikan arahan dan masukan untuk memperlancar usaha yang di mulai nya, tetapi apabila nasabah yang melakukan peminjaman dana itu sudah memiliki usaha tetap sebelumnya, contoh nya perkebunan sawit, maka dia lebih mengerti tentang perkebunan dia sendiri dari pada kita, karna kita aja tidak punya perkebunan sawit. Dia seperti itu sistemnya” (Wawancara tanggal 09 Januari 2019, Bapak Suardi, Selaku Sekretaris Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kurang)

Sementara itu jawaban lain diberikan oleh ibu Desmawati yang menjabat sebagai staf administrasi di interernal BUMDes Terantang Jaya Desa Terantang Manuk, beliau memberikan jawabannya kepada penulis sebagai berikut:

“Secara pribadi, memang tidak mendapatkan pelatihan khusus, karna masih belum lama juga bekerja di sini, tetapi memang selalu diberikan masukan-masukan oleh teman-teman di sini, dan selalu di arahkan, dan hal itu saya rasa bagian dari proses pemberian bimbingan yang dilakukan oleh teman-teman kerja kepada saya. Kalau secara formal saya rasa belum pernah dilakukan di BUMDes Terantang Jaya” (Wawancara tanggal 09 Januari 2019, Ibu Desmawati, Staf Analisis BUMDes Terantang Jaya, Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kurang)

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis juga melakukan observasi dilapangan untuk melihat bagaimana sesungguhnya yang terjadi, apakah sudah sesuai dengan hasil penelitian atau justru berbeda dengan fakta sesungguhnya dilapangan, dan hasil yang penulis dapat adalah menunjukkan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BUMDes UED-SP Terantang Jaya tidak bersifat terus-menerus, melainkan hanya melalui personal dan dari satu nasabah ke nasabah lainnya, sementara itu proses bimbingan yang dilakukan juga tidak bersifat formal, melainkan bersifat internal saja seperti proses pengarahan yang dilakukan oleh seorang atas kepada bawahannya yang baru menyesuaikan pekerjaan.

Pembahasan selanjutnya terkait dengan indikator yang ke (4) empat, dimana dalam pembahasan ini penulis akan menyajikan hasil penelitian penulis yang dilakukan dengan berpatokan pada “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”, dimana dalam penelitian ini penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan pihak Kepala Desa Terantang Manuk dan juga pihak Pengurus BUMDes Terantang Jaya itu sendiri. Dan adapun hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner dan juga teknik wawancara yang telah penulis lakukan, dapat dilihat pada pembahasan tabel dan analisis di bawah ini:

4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Banyak cara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya adalah dengan melaksanakan BUMDes dengan optimal dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

Salah satu tujuan adanya BUMDes ini agar daerah tersebut bisa memanfaatkan hasil tambang atau sumber daya alam yang ada di Desa tersebut. Hal ini selain meningkatkan perekonomian masyarakat dengan membuat usaha menggunakan bahan dari kekayaan alam daerah, keuntungan yang daerah pun ada yaitu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Di dalam kegiatan BUMDes ini adalah dengan cara memberdayakan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan hasil sumber daya alam yang ada di daerahnya dengan optimal.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis di bawah ini:

Tabel V.7 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Nasabah BUMDes terhadap Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pengembangan Program Untuk Meningkatkan Usaha Masyarakat	6 (12%)	29 (58%)	15 (30%)	50 (100%)
2	Memberikan Pelatihan Untuk Menciptakan Produk-Produk Asli Daerah Yang Memiliki Nilai Jual	8 (16%)	33 (60%)	9 (18%)	50 (100%)
Jumlah		14	62	24	100
Rata-Rata		7	31	12	50
Persentase		14%	62%	24%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.7 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh Nasabah BUMDes Terantang Jaya yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 7 orang dan persentasenya adalah 14%. Program yang dijalankan oleh pihak BUMDes adalah pada bidang simpan-pinjam. Masyarakat yang merupakan nasabah pada BUMDes ini menilai bahwa dengan adanya BUMDes Simpan-Pinjam akan mempermudah mereka dalam menjalankan usaha yang sedang dijalankannya dengan cepat.

Sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 31 orang dengan persentase 62%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Nasabah BUMDes Terantang

Jaya ini adalah pada kategori “Cukup Baik” hal ini dikarenakan bahwa pihak Nasabah menilai memang BUMDes Terantang Jaya yang ada di Desa mereka memiliki program salah satunya Simpan-Pinjam, dengan adanya program Simpan-Pinjam tersebut masyarakat yang memiliki usaha seperti dominannya perkebunan dapat menambah bibit perkebunan mereka, tetapi untuk program lain itu memang tidak, khususnya untuk masyarakat yang tidak memiliki modal apa-apa, dan sangat membutuhkan bantuan, tetapi itu tidak didapatkan dari BUMDes Terantang Jaya ini. Dan masyarakatpun mengatakan, program yang berjalan saja hanya simpan-pinjam jadi pelatihan apa yang mau diberikan kepada masyarakat, karena pada dasarnya uang yang dipinjam oleh masyarakat untuk menambah modal untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan juga perkebunan lainnya.

Sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” adalah rata-rata 12 orang dengan persentase 24%. Nasabah yang memberikan tanggapan pada kategori ini adalah bahwa pihak BUMDes memang sudah menjalankan tugasnya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam memberikan program kepada masyarakat termasuk program yang sudah ditetapkan kepada BUMDes, ada beberapa program yang sudah direncanakan, tetapi hanya program simpan-pinjam, dan program ini tidak semuanya bisa mendapatkannya, disamping itu pihak BUMDes tidak pernah melakukan bimbingan ataupun pelatihan untuk menciptakan produk-produk yang terbuat dari bahan-bahan sumber daya alam daerahnya.

Untuk melengkapi jawaban yang telah di dapatkan di atas, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan perwakilan dari pengelola BUMDes Terantang Jaya, yaitu Bapak Janri, S.T selaku Direktur Utama dari

BUMDes tersebut, dan adapun tanggapan yang diberikan oleh beliau terkait dengan pertanyaan yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

“Saat ini focus dari BUMDesa UED-SP Terantang Jaya adalah menjalankan proses Simpan-Pinjam terlebih dahulu, belum sampai pada pengembangan usaha, karna kita tidak ingin nantinya terlalu banyak program tetapi tidak ada yang berjalan dengan baik, jadi saat ini hanya program Simpan-Pinjamlah yang dijalankan terlebih dahulu. Dan untuk pemberian pelatihan juga tidak ada dilakukan oleh pihak BUMDes Terantang Jaya, itu diluar kuasa kita, karna masyarakat itu kan tidak semuanya memiliki tujuan yang sama dalam upaya memanfaatkan dana yang dipinjamnya, kecuali memang semua masyarakat secara bersama-sama melakukan terobosan untuk menjalankan satu bidang usaha, barulah kita bisa kumpulkan mereka dan berikan masukan.” (Wawancara tanggal 09 Januari 2019, Bapak Janri, S.T Direktur BUMDes Terantang Jaya)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pemberian pelatihan dan juga pengembangan program-program di lingkungan BUMDes Terantang Jaya belum dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa, hal ini dikatakan untuk memfokuskan pelaksanaan Simpan-Pinjam yang saat ini sedang dijalankan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang tidak ada dilakukan pemberian pelatihan kepada masyarakat yang menjadi nasabah dari BUMDes Terantang Jaya itu sendiri, dan tentunya hal ini dikarenakan bahwa masyarakat yang melakukan pemanfaat dana dari BUMDes memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan tujuan mereka atau pemanfaatan dana yang digunakan juga berbeda-beda.

Selanjutnya penulis akan menyajikan pembahasan penulis selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai indikator yang ke 5 (lima), yang membahas tentang “Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Desa”, dimana hasil dari pembahasan tentang indikator tersebut dapat di lihat pada penyajian pembahasan dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

5. Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Desa

Fungsi dan tujuan utama dari BUMDes ini adalah agar dapat mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa. Suatu desa dapat dikatakan maju apabila perekonomian masyarakat tumbuh dan berkembang dengan pesat. Hal ini tentunya harus ikut campur dari peran Pemerintah Desa agar dapat membantu memberikan jalan kepada masyarakat yang tidak memiliki modal baik secara financial maupun dari segi bimbingan dalam berusaha bagi masyarakat yang tidak memiliki pengalaman dalam membangun wirausaha yang mandiri. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis di bawah ini:

Tabel V.8 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Nasabah BUMDes terhadap Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Merealisasikan Kegiatan BUMDes Secara Transparan	7 (14%)	31 (62%)	12 (24%)	50 (100%)
2	Mengutamakan Masyarakat Dengan Tingkat Perekonomian Rendah	5 (10%)	33 (66%)	12 (24%)	50 (100%)
Jumlah		12	64	24	100
Rata-Rata		6	32	12	50
Persentase		12%	64%	24%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.8 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh nasabah BUMDes Terantang Jaya yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 6 orang dan persentasenya adalah 12%. Alasan nasabah memberikan tanggapan pada ketegori baik ini adalah dikarenakan mereka menilai bahwa pihak BUMDes sudah menjalankan tugasnya dengan baik, buktinya BUMDes tersebut masih berjalan, walaupun mereka tidak mengetahui berapa jumlah saldo pendapatan ataupun pengeluarannya, yang penting bagi mereka adalah mereka masih bisa meminjam uang pada BUMDes.

sedangkan reponden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 32 orang dengan persentase 64%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Nasabah BUMDes Terantang Jaya ini adalah pada kategori “Cukup Baik” hal ini dikarenakan bahwa pihak Nasabah menilai BUMDes Terantang Jaya ini untuk keterbukaan masalah anggaran, berapa saldo yang ada di BUMDes Terantang Jaya, yang belum membayar ataupun menunggak, masyarakat tidak mengetahui hal itu, tetapi yang masyarakat nilai bahwa selagi mereka masih bisa meminjam berarti BUMDes Terantang Jaya nya masih sehat dan berjalan dengan baik, dan untuk penilaian terhadap BUMDes Terantang Jaya ini mengutamakan masyarakat dengan tingkat perekonomian rendah, masyarakat mengatakan belum tergambar sikap seperti itu, karena mereka menilai siapa yang memiliki usaha dan anggunan yang menjaminnya lebih tinggi itulah yang bisa meminjam ke BUMDes Terantang Jaya. Jadi dapat dikatakan bahwa program ini memang sangat membantu masyarakat, tetapi tujuannya kurang tepat sasaran.

Sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” adalah rata-rata 12 orang dengan persentase 24%. Hal ini dikarenakan mereka menilai tidak mendapatkan informasi dari pihak BUMDes terkait dana yang ada pada BUMDes, dan program BUMDes tidak mengutamakan bagi masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang rendah.

Untuk mengetahui permasalahan sesungguhnya dilapangan, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan perwakilan Desa dan juga Perwakilan dari pihak BUMDes Terantang Jaya, adapun wawancara yang akan penulis sajikan dibawah berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar indikator yang ke 5 (lima), dimana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Tidak perbedaan dalam menjalankan program ini, semua sama saja, bagi siapa saja yang menginginkan pinjaman, maka dapat mengajukannya ke BUMDes Terantang Jaya, kita memiliki tim Analisis Kredit, akan kita evaluasi, dan apabila memang sesuai dengan persyaratan yang di minta, maka kita akan mencairkan dana nya, khususnya untuk masyarakat kurang mampu, kita juga tetap melayani dan memberikan pinjaman, tetapi sesuai dengan kemampuan mereka juga, akan dilakukan analisis juga untuk hal tersebut” (Wawancara tanggal 09 Januari 2019, Bapak Janri, S.T Direktur BUMDes Terantang Jaya)

Sementara itu, jawaban lain diberikan oleh pihak perwakilan Desa Terantang Manuk yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Suardi selaku Sekretaris Desa Terantang Manuk yang juga memberikan pendapatkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan, dan adapun jawaban yang diberikan oleh beliau berkaitan dengan indikator yang ke (5) lima, adalah berikut ini:

“Tidak ada yang diprioritaskan, karna sifatnya kan simpan pinjam, dan siapa aja bisa melakukan peminjaman dan juga menyimpan di dalam BUMDes Terantang Jaya, tetapi memang permasalahannya ada pada masyarakat yang tidak memiliki angunan untuk meminjam, kita

juga tidak bisa berbuat banyak, karna ada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik itu pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten, karna sifatnya mengikat, jangan sampai nanti kalau kita memberikan pengecualian kepada masyarakat yang tidak memiliki angunan, dan dana nya kita cairkan, justru akan memberikan kecemburuan sosial bagi masyarakat lainnya” (Wawancara tanggal 09 Januari 2019, Bapak Suardi, Selaku Sekretaris Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kurang)

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan pada hasil wawancara di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa proses pencairan dana di dalam BUMDes Terantang Jaya tidak memandang atau tidak membedakan masyarakat, siapapun dapat melakukan peminjaman terhadap dana tersebut dan siapapun dapat melakukan penyimpanan kepada bagan BUMDes yang dimiliki oleh Desa Terantang Manuk di Kecamatan Pangkalan Kurang.

Dan berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan fakta bahwa memang tidak ada perbedaan yang dilakukan oleh pihak pengelola BUMDes Terantang Jaya, semua disamakan, justru dengan hal tersebutlah yang memberikan kesulitan kepada masyarakat yang tidak memiliki angunan sebagai jaminan untuk melakukan peminjaman dana.

6. Memberikan Kesempatan Usaha

BUMDes adalah salah satu jalan yang diberikan Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Dengan adanya program-program pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membuka ataupun meningkatkan usahanya. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis di bawah ini:

Tabel V.9 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Nasabah BUMDes terhadap Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberikan Pelatihan Terlebih Dahulu Kepada Masyarakat Agar Mengelola Usaha	12 (24%)	28 (56%)	10 (20%)	50 (100%)
2	Melakukan Pengawasan Secara Intensif Terhadap Masyarakat Yang Sudah Diberikan Pinjaman	10 (20%)	30 (60%)	10 (20%)	50 (100%)
Jumlah		22	58	20	100
Rata-Rata		11	29	10	50
Persentase		22%	58%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.9 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh Nasabah BUMDes Terantang Jaya yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 11 orang dan persentasenya adalah 22%. Bahwa nasabah menilai pihak BUMDes sudah melakukan pengawasan secara intensif terhadap masyarajat yang sudah diberikan pinjaman.

Sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 29 orang dengan persentase 58%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Nasabah BUMDes Terantang Jaya ini adalah pada kategori “Cukup Baik” hal ini dikarenakan bahwa pihak Nasabah menilai BUMDes yang ada di Desa mereka pernah melakukan

pengecekan ke lokasi sebelum diberikan pinjamannya, setelah diberikan pinjaman, pihak BUMDes Terantang Jaya tidak pernah melakukan pengecekan ataupun pengawasan, tetapi jika nasabah sudah menunggak dalam waktu lama baru mereka turun ke lapangan, melihat usaha yang pernah diusulkan pada saat sebelum melakukan peminjaman dan melakukan peringatan ataupun penagihan.

Dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” adalah rata-rata 10 orang dengan persentase 20%. Mereka menilai pihak BUMDes tidak melakukan pengawasan secara intensif pada masyarakat yang sudah diberikan pinjaman, dan tidak pernah memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mengelola usaha mereka.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden nasabah dari BUMDes Terantang Jaya di atas, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari masing-masing informan yang berguna untuk melengkapi hasil dari penelitian ini, dimana masing-masing informan yang telah penulis wawancarai adalah Direktur BUMDes Terantang Jaya, yaitu Bapak Janri, S.T. Staff Analisis Kredit Ibu Nursiti Fadilah, dan yang terakhir adalah Ibu Desmawati sebagai Staf Administrasi dari BUMDes Terantang Jaya, dan adapun hasil wawancara yang pertama penulis sajikan adalah dengan Direktur BUMDes Terantang Jaya yaitu Bapak Janri S.T. yang mana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Untuk pelatihan saya rasa kita belum sejauh itu, tetapi untuk proses pengawasan yang dilakukan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pengawasan dilakukan oleh tim analisis kredit kita, nanti laporan-laporan yang diberikan oleh beliau barulah dilakukan evaluasi, apa yang harus diperbaiki dan mana yang harus di tindak lanjuti, apabila memang diperlukan tindakan pemanggilan dan pemberian peringatan kepada nasabah, maka kita akan melakukannya, biasanya yang

menjadi masalah itu karna harga dan produksi pertanian yang menurun, pasti berpengaruh ke pembayaran kredit mereka” (Wawancara tanggal 09 Januari 2019, Bapak Janri, S.T Direktur BUMDes Terantang Jaya)

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa proses pelaksanaan pelatihan memang belum dilakukan oleh pihak BUMDes Terantang Jaya, dimana dalam pelaksanaannya, pihak BUMDes hanya berfokus kepada proses Simpan-Pinjam saja, tetapi proses pengawasan yang dilakukan terus berjalan hingga nasabah tersebut selesai melakukan pembayaran cicilan kredit yang menjadi tanggung jawab mereka, bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak BUMDes Terantang Jaya tentunya bukan turun langsung kelapangan untuk melihat usaha keuangan dari masing-masing nasabah mereka, tetapi system yang dilakukan adalah audit data yang masuk, apabila dalam audit data, ada nasabah yang sudah lama tidak melakukan penunggakan pembayaran, barulah tim analisis kredit melakukan pemanggilan atau pemberian peringatan kepada nasabah tersebut.

7. Membuka Lapangan Pekerjaan

Pada saat sekarang ini yang menjadi permasalahan terbesar adalah masalah tingkat pengangguran. Hal ini dikarenakan lapangan kerja yang begitu sedikit dan tidak bisa menampung masyarakat setiap tahunnya. Tetapi diharapkan kepada masyarakat untuk bisa mendirikan usaha membuka lapanga pekerjaan sendiri, dengan catatan hal ini tidak lepas dari dukungan pemerintahan. BUMDes adalah suatu bentuk dukungan pemerintahan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat membuat perekonomian masyarakat yang mandiri.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis di bawah ini:

Tabel V.10 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Nasabah BUMDes terhadap Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberikan Modal Secara Materil Untuk Membuka Usaha Bagi Masyarakat Yang Belum Memiliki Pekerjaan	12 (24%)	28 (56%)	10 (20%)	50 (100%)
2	Mendorong Masyarakat Untuk Menciptakan Industri Yang Mampu Menyerap Tenaga Kerja	20 (40%)	20 (40%)	10 (20%)	50 (100%)
Jumlah		32	48	20	100
Rata-Rata		16	24	10	50
Persentase		32%	48%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.10 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh Nasabah BUMDes Terantang Jaya yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 16 orang dan persentasenya adalah 32%. Hal ini dikarenakan bahwa pihak nasabah mendapat keuntungan dari program BUMDes, karena mereka merasakan positifnya yaitu dapat mengembangkan usahanya dengan cara meminjam ke BUMDes.

Sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik”, adalah rata-rata 24 orang dengan persentase 48%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Nasabah BUMDes Terantang Jaya ini adalah pada kategori “Cukup Baik” hal ini dikarenakan bahwa pihak Nasabah menilai BUMDes Terantang Jaya yang ada di Desa mereka memang sudah memberikan bantuan tetapi kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha seperti masyarakat yang memiliki kebun, dan juga usaha sebelum melakukan pinjaman, dan mereka bisa mengembangkan usaha kebun mereka. Tetapi jika untuk memberikan modal kepada masyarakat yang tidak memiliki usaha apalagi untuk membuat lapangan kerja seperti industri rumahan itu masih jauh dari harapan, karna pada dasarnya mereka yang tidak memiliki pekerjaan adalah mereka yang juga tidak memiliki barang yang bisa di jadikan sebagai anggunan untuk jaminan di BUMDes Terantang Jaya, Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras.

Dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” adalah rata-rata 10 orang dengan persentase 20%. Responden memberikan pendapat bahwa belum semua dapat merasakan dampak positif adanya BUMDes ini, karena yang bisa merasakannya adalah masyarakat yang memiliki anggunan yang lebih menjamin seperti surat tanah.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden nasabah dari BUMDes Terantang Jaya di atas, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari masing-masing informan yang berguna untuk melengkapi hasil dari

penelitian ini, dimana masing-masing informan yang telah penulis wawancarai adalah Sekretaris Desa Terantang Manuk, yaitu Bapak Suardi, Direktur BUMDes Terantang Jaya, yaitu Bapak Janri, S.T. Staff Analisis Kredit Ibu Nursiti Fadilah, dan yang terakhir adalah Ibu Desmawati sebagai Staf Administrasi dari BUMDes Terantang Jaya, dan adapun hasil wawancara yang pertama penulis sajikan adalah dengan Direktur BUMDes Terantang Jaya yaitu Bapak Janri S.T. yang mana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Hal seperti inilah yang harus kita luruskan, kami pengurus BUMDes Terantang Jaya bukannya tidak mau memberikan bantuan kepada mereka yang pengangguran, bahkan memberikan secara Cuma-Cuma juga saya pribadi mau, jika saya memiliki uang lebih, tetapi khususnya di BUMDes ini kan kita ada aturan yang telah di tetapkan, dan itu di atur juga oleh pemerintah, jadi harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tersebut” (Wawancara tanggal 09 Januari 2019, Bapak Janri, S.T Direktur BUMDes Terantang Jaya)

Sementara untuk jawaban yang diberikan oleh pihak tim analisis kredit yang berkerja di BUMDes Terantang Jaya, yaitu ibu Nursiti Fadilah memberikan keterangannya terkait dengan pemberian modal usaha dari BUMDes Terantang Jaya kepada masyarakat yang memang tidak memiliki pekerjaan atau masyarakat yang memang tidak memiliki modal untuk membuka usaha khususnya di Desa Terantang Manuk, dan adapun tanggapan yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan penulis, adalah sebagai berikut:

“Tidak bisa seperti itu, ada tahapan-tahapan yang menjadi aturan dan persyaratan di dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, ini bukan dana hibah dan Cuma-Cuma, ini sifatnya koperasi yang sistemnya simpan dan pimjam, masyarakat juga harus melakukan penyimpanan dana untuk bisa melakukan peminjaman dana yang lebih besar, jika ditanya bagai cara kita membantu masyarakat untuk menciptakan industry kreatif dan meningkatkan perekonomian serta lapangan pekerjaan, tentunya jawabannya ya BUMDes Terantang Jaya

itu sendiri, karna ini adalah wadah untuk permasalahan itu” (Wawancara tanggal 09 Januari 2019, Ibu Nursiti Fadilah, Staf Analisis Kredit BUMDes Terantang Jaya, Desa Terantang Manuk)

Permasalahan terkait dengan pengelolaan system yang ada pada BUMDes Terantang Jaya Desa Terantang Manuk bukan hanya menjadi permasalahan pada anggota organisasi itu sendiri, melainkan pertanggung jawaban yang harus juga diberikan kepada pihak Desa sebagai laporan wajib, dengan demikian maka siapapun yang akan melakukan pemanfaatan dana yang dikelola oleh BUMDes harus memenuhi persyaratannya terlebih dahulu. dan untuk mencari jawaban guna melengkapi hasil penelitian ini, penulis juga telah melakukan wawancara dengan pihak perwakilan Kantor Kepala Desa Terantang Manuk yaitu Bapak Suardi sebagai Sekretaris Desa, yang mana beliau memberikan tanggapannya terkait pertanyaan penulis adalah sebagai berikut:

“Tentunya harus sesuai dengan prosedur, karna hal ini kan berkaitan dengan pemanfaatan dana, yang namanya dana atau uang tentunya memiliki resiko yang besar, dengan demikian kita perangkat desa menentukan dan menyusun aturan-aturan terkait dengan pemanfaatan dana tersebut, jadi tidak bisa sembarang di cairkan, bukan berarti mereka tidak memiliki pekerjaan lantas kita akan berikan pinjaman tanpa harus melengkapi persyaratan, tidak bisa demikian, kita harus selesaikan dengan prosedur yang berlaku juga tentunya.” (Wawancara tanggal 09 Januari 2019, Bapak Suardi, Selaku Sekretaris Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kurang)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa proses peminjaman dana di BUMDes Terantang Jaya memang harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tahapan-tahapan peminjaman lainnya, dengan demikian maka masyarakat yang memang tidak memiliki persyaratan yang dibutuhkan oleh pengurus BUMDes, maka dengan

akan secara otomatis tidak bisa memanfaatkan dana pinjaman dari pihak BUMDESA Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Terantang Jaya, Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kurang, Kabupaten Pelalawan.

C. Rekapitulasi Penelitian Tentang Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kurus Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil penulis lakukan dimasing-masing indikator di atas yang mana diantaranya adalah indikator yang pertama yang membahas tentang “Memantapkan Kelembagaan Perekonomian Desa” kemudian indikator yang kedua adalah “Menciptakan Kesempatan Berusaha”, indikator ke tiga “Mendorong Peran Pemerintahan Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan” dan indikator ke empat adalah “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”, dan indikator yang ke lima adalah “Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Desa”, indikator yang ke enam adalah “Memberikan Kesempatan Usaha”, serta indikator yang ke tujuh adalah “Membuka Lapangan Pekerjaan” dan di dukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan baik yang mana dalam melakukan observasi penulis melakukannya di BUMDes Terantang Manuk Jaya yang ditentukan oleh penulis.

Setelah dihitung hasil dari tanggapan responden yang berdasarkan kuesioner dari ke-tujuh indikator maka, dapat dibuat rekapitulasi dari hasil keseluruhan tabel-tabel pada indikator, guna untuk memperoleh hasil keseluruhannya, dan dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan tanggapan responden. Jadi ke-tujuh indikator ini dijabarkan di atas, maka penulis dapat membuat rekapitulasi untuk mengetahui hasil secara keseluruhannya. Berikut

hasil rekapitulasi dari hasil kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat sebagai nasabah dari BUMDes Terantang Jaya, Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kurang, Kabupaten Pelalawan.

Tabel V.11 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Nasabah BUMDes Terkait Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya.

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memantapkan Kelembagaan Perekonomian Desa	11 (22%)	33 (66%)	6 (12%)	50 (100%)
2	Menciptakan Kesempatan Berusaha	9 (18%)	27 (54%)	14 (28%)	50 (100%)
3	Mendorong Peran Pemerintahan Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan	11 (22%)	31 (62%)	8 (16%)	50 (100%)
4	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	7 (14%)	31 (62%)	12 (24%)	50 (100%)
5	Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Desa	6 (12%)	32 (64%)	12 (24%)	50 (100%)
6	Memberikan Kesempatan Usaha	11 (22%)	29 (58%)	10 (20%)	50 (100%)
7	Membuka Lapangan Pekerjaan	16 (32%)	24 (48%)	10 (20%)	50 (100%)
Jumlah		71	207	72	350
Rata-Rata		10	30	10	50
Persentase		20%	60%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.11 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung terhadap Evaluasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 Pasal 3 sebagai tolak ukur, yaitu Memantapkan Kelembagaan Perekonomian Desa, Menciptakan Kesempatan Berusaha, Mendorong Peran Pemerintahan Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Desa, Memberikan Kesempatan Usaha, Membuka Lapangan Kerja maka di peroleh rata-rata responden memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” yaitu 30 orang responden dengan persentase 60% dan pada kategori “Kurang Baik” responden yang memberikan tanggapan rata-rata 10 orang responden dengan persentase 20%, dan yang terakhir adalah jawaban pada kategori “Baik” dimana dalam jawaban ini rata-rata responden memberikan tanggapan 10 orang responden dengan persentase 20%.

Dari kesimpulan yang di dapat dalam hasil rekapitulasi di atas dapat di jelaskan bahwa Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan cukup baik, hal ini disebabkan pengakuan yang diberikan oleh masyarakat dimana masih banyak masyarakat belum merasakan dampak dari keberadaan Badan Usaha milik desa tersebut, berdasarkan masing-masing item penilaian yang telah di jelaskan dalam

pembahasan sebelumnya, maka masih banyak point-point yang belum terlaksana oleh pihak pengelola BUMDEs Terantang Jaya, contohnya seperti pemberian modal pinjaman kepada masyarakat yang memang lebih membutuhkan tetapi terkendala terhadap angunan (jaminan), sehingga tidak bisa mendapatkan modal pinjaman usaha, dan juga tidak adanya pelatihan ataupun penyuluhan yang diberikan oleh pihak pengelola BUMDes kepada nasabahnya, sehingga hal tersebut berdampak kepada pemanfaatan dana yang sering disalah gunakan oleh para nasabah. Dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola BUMDes Terantang Jaya, yang mana hal ini menyebabkan banyak nasabah yang melakukan penunggakan pembayaran kredit mereka.

Jadi dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan observasi penulis maka penulis menarik kesimpulan pada penelitian ini yaitu berada pada kategori “Cukup Baik”.

D. Faktor-Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak BUMDes Terantang Manuk Jaya Dalam Peningkatan Ekonomi Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Dalam menjalankan roda organisasi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk, yaitu Usaha Simpan Pinjam Terantang Jaya, tentunya pihak pengelola pernah mengalami kendala-kendala yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan di dalam Badan Usaha tersebut, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi tersebut, maka penulis akan menyajikannya dalam pembahasan di bawah ini:

- 1) Kendala yang dihadapi oleh pengelola BUMDES Terantang Jaya dalam indikator yang pertama adalah ketersediaan SDM yang terbatas untuk melakukan pengawasan secara intens dan terus menerus.

- 2) Kendala yang didapatkan pada indikator yang ke 2 (dua) adalah pemerataan tingkat ekonomi di Desa Terantang Manuk, dimana beberapa kepala keluarga masing belum bisa mendapatkan pinjaman dikarenakan memang belum mampu melakukan penyimpanan dana dan belum memiliki persyaratan sebagai angunan.
- 3) Kendala pada indikator yang ke 3 (tiga) adalah proses bimbingan dan pembinaan yang belum dapat berjalan, dikarenakan kondisi Sumber Daya Manusia yang terbatas dan juga proses pemanfaatan dana yang tidak seluruhnya digunakan untuk menjalankan usaha.
- 4) Kendala pada indikator yang ke 4 (empat) adalah proses pelatihan yang memang belum berjalan, karna pada prosesnya, pihak BUMDES Terantang Jaya belum memiliki Sumber Daya Manusia untuk memberikan pelatihan kepada nasabahnya.
- 5) Proses penyaluran dana yang ada di BUMDesa Terantang Jaya berjalan dengan transparan dan tidak membedakan masyarakat.
- 6) Proses pengawasan dan pelaksanaan pelatihan terkendala pada sektor ketersediaan Sumber Daya Manusia pengelola BUMDes Terantang Jaya.
- 7) Kendala pada indikator yang ke 7 (tujuh) adalah proses peminjaman yang dilakukan oleh nasabah tentunya memiliki tujuan masing-masing dalam upaya pemanfaatan dana yang mereka terima, sehingga pihak BUMDes Terantang Jaya tidak bisa memaksakan agar uang yang mereka cairkan digunakan untuk menciptakan usaha baru ataupun usaha yang menciptakan lapangan pekerjaan.

BAB VI

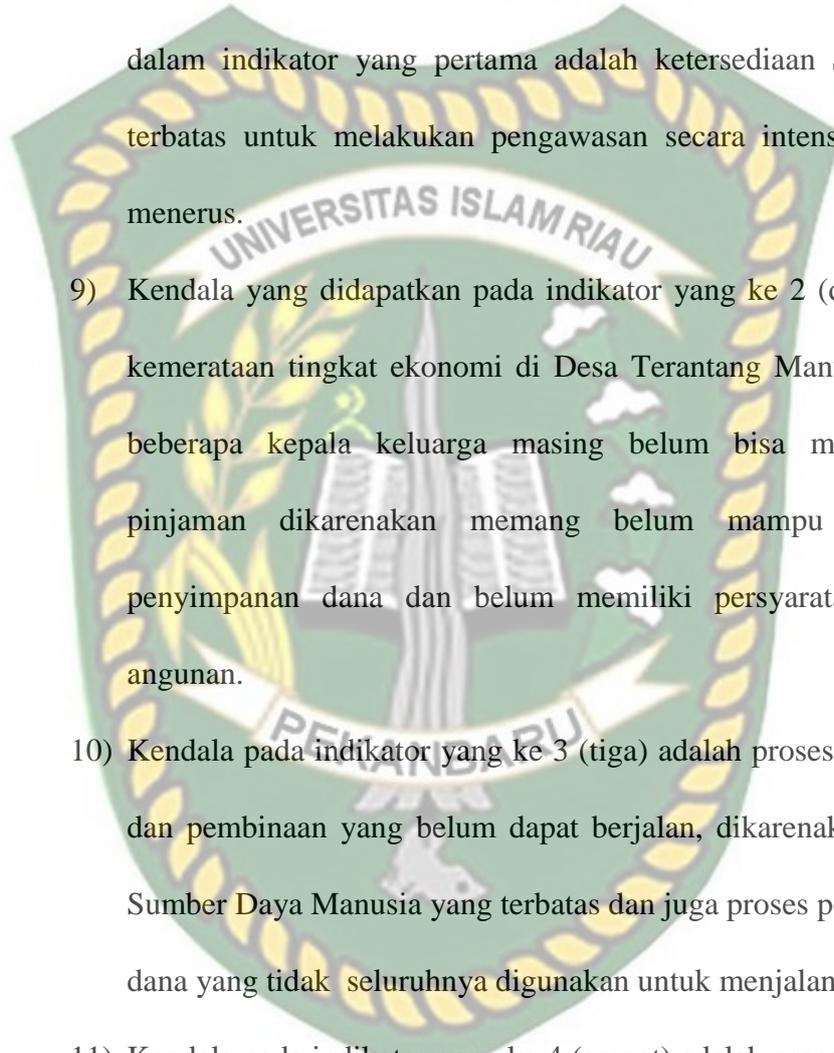
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian, wawancara dengan *key informan* dilapangan dan juga pengumpulan data berdasarkan penyebaran kuisisioner. Maka adapun kesimpulan secara keseluruhan yang dapat penulis tarik dari hasil penelitian ini adalah berada pada jawaban dengan kategori “Cukup Baik” jawaban ini penulis ambil kesimpulannya dari hasil pengumpulan data dan wawancara serta observasi langsung kelapangan dari responden yaitu Nasabah dari Badan Usaha Milik Desa yang berbentuk Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Terantang Jaya, Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.
2. Dalam menjalankan roda organisasi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk, yaitu Usaha Simpan Pinjam Terantang Jaya, tentunya pihak pengelola pernah mengalami kendala-kendala yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan di dalam Badan Usaha tersebut, dan untuk mengetahui kendala-kendala

yang terjadi tersebut, maka penulis akan menyajikannya dalam pembahasan di bawah ini:

- 8) Kendala yang dihadapi oleh pengelola BUMDES Terantang Jaya dalam indikator yang pertama adalah ketersediaan SDM yang terbatas untuk melakukan pengawasan secara intens dan terus menerus.
- 9) Kendala yang didapatkan pada indikator yang ke 2 (dua) adalah pemerataan tingkat ekonomi di Desa Terantang Manuk, dimana beberapa kepala keluarga masing belum bisa mendapatkan pinjaman dikarenakan memang belum mampu melakukan penyimpanan dana dan belum memiliki persyaratan sebagai angunan.
- 10) Kendala pada indikator yang ke 3 (tiga) adalah proses bimbingan dan pembinaan yang belum dapat berjalan, dikarenakan kondisi Sumber Daya Manusia yang terbatas dan juga proses pemanfaatan dana yang tidak seluruhnya digunakan untuk menjalankan usaha.
- 11) Kendala pada indikator yang ke 4 (empat) adalah proses pelatihan yang memang belum berjalan, karna pada prosesnya, pihak BUMDES Terantang Jaya belum memiliki Sumber Daya Manusia untuk memberikan pelatihan kepada nasabahnya.
- 12) Proses penyaluran dana yang ada di BUMDesa Terantang Jaya berjalan dengan transparan dan tidak membedakan masyarakat.



13) Proses pengawasan dan pelaksanaan pelatihan terkendala pada sektor ketersediaan Sumber Daya Manusia pengelola BUMDes Terantang Jaya.

14) Kendala pada indikator yang ke 7 (tujuh) adalah proses peminjaman yang dilakukan oleh nasabah tentunya memiliki tujuan masing-masing dalam upaya pemanfaatan dana yang mereka terima, sehingga pihak BUMDes Terantang Jaya tidak bisa memaksakan agar uang yang mereka cairkan digunakan untuk menciptakan usaha baru ataupun usaha yang menciptakan lapangan pekerjaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk dan bermanfaat bagi nasabah dari Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk itu sendiri. Dan adapun saran yang ingin penulis berikan kepada pihak-pihak yang telah penulis disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Saran kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk agar menambah pegawainya dalam menjalankan roda organisasi Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk khususnya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, tujuan dari ditambahnya pegawai tersebut adalah agar pembagian tugas yang dilakukan dapat berjalan

dengan baik dan anggota yang tersedia tidak memiliki tugas yang menumpuk di satu individu saja.

2. Diharapkan Badan Usaha Milik Desa Terantang Manuk melakukan kerjasama dengan pihak luar atau swasta yang berfungsi untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada nasabahnya agar mampu mengelola usaha yang dijalankan, dan berdampak kepada peningkatan ekonomi dari nasabah itu sendiri.
3. Diharapkan kepada BUMDes, agar menciptakan peluang usaha dengan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada nasabahnya.
4. Disarankan kepada BUMDes Terantang Jaya agar memberikan informasi yang transparan kepada Nasabahnya terkait dengan persyaratan, Kemudahan, dan juga terkait dengan pinjaman yang disediakan.
5. Diharapkan agar pengelola BUMDes Terantang Jaya melakukan pengawasan secara intensif kepada nasabahnya agar tidak terjadi kemacetan dalam pembayaran kredit.
6. Saran selanjutnya adalah agar BUMDes Terantang Jaya memastikan pengelolaan uang yang dipinjam oleh pihak Nasabah berjalan sesuai dengan rencana yang diajukan pada proposal peminjaman, hal ini bertujuan agar pengelolaan dana pinjaman berjalan dengan baik.
7. Saran yang terakhir adalah, diberikannya kemudahan bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki angunan untuk meminjam dana di BUMDes Terantang Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, Colin Mac, Ichlasul Amal, 2003, *Hubungan Pusat Daerah Dalam Pembangunan*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Badrudin, 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung, Alfabeta.
- Hasibuan, Melayu S.P, 2001. *Manajemen (Dasar, Penegertian, dan Masalah)*. Bandung, Bumi Aksara.
- Hasibuan, Melayu S.P, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT. Bumi Aksara (Revisi Kelima).
- Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta, APP AMP YPKM, Edisi ketiga.
- Kusdi, 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Malang, Salemba Humanika
- Marnis, 2009. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, PT. Panca Abdi Nugraha.
- Pusat Bahasa, 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetak kesembilan edisi IV)*. Jakarta. PT Gramedia Pusat Utama.
- Siagain, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siswanto, B, 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Solihin, Ismail, 2010. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Erlangga
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, 2004. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Kencana
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Adminitrasi Negara*. Bandung, Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor, Erlangga.
- Terry, George R dan Leslie W. Rue, 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara
- Thoha, Mftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Yogyakarta, Kencana
- Tunggal, Amin Widjaja, 2002. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta, PT Rineka Cifta.
- Voll, Willy D.S, 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Sinar Grafika.

Wicaksono, Kristian Widya, 2014. *Telaah Kritis Administrasi & Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Bandung, Gava Media

Zulkifli, 201. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*. Pekanbaru, .UIR PRESS

Dokumentasi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang: *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang: *Desa*

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 1 Tahun 2015 Tentang: *Perubahan Penamaan Desa Menjadi kampung*

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 5 Tahun 2015 Tentang: *Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)*

